



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948

Email : kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan laporan tahun ketiga untuk periode 2020 - 2024 atas bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada segenap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Laporan kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik untuk penyempurnaan laporan kinerja yang lebih baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.



Banjarmasin, Januari 2023
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. SUSUNAN ORGANISASI	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN	8
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. PERENCANAAN KINERJA	10
B. PERJANJIAN KINERJA	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	83
IV. PENUTUP	88
A. KESIMPULAN	88
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	89
V. LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	
KERTAS KERJA CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR	
SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA	
HASIL REVIU LAPORAN KINERJA	
SURAT PERNYATAAN REVIU LAPORAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum	6
Tabel 2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	7
Tabel 3	Perubahan Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	12
Tabel 4	Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024	12
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahunan 2022	13
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 7	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 8	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020-2022	82
Tabel 9	Laporan Posisi Barang Milik Negara	83
Tabel 10	Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Jenis Belanja	83
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Klasifikasi Capaian Rincian Output Kegiatan / Rincian Output	84
Tabel 12	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Distrbusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	5
Grafik 2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	7
Grafik 3	Distibusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Grafik 4	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	19
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara / Pelabuhan/PLBDN dengan Target RAK	20
Grafik 6	Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	30
Grafik 7	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun Tahun 2020-2022	31
Grafik 8	Perbandingan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target RAK	32
Grafik 9	Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu Masuk Negara	43
Grafik 10	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020-2022	45
Grafik 11	Perbandingan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dengan Target RAK.....	46
Grafik 12	Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran	53
Grafik 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2022	53

Grafik 14	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target RAK	54
Grafik 15	Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	60
Grafik 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020-2022	61
Grafik 17	Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target RAK	63
Grafik 18	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker	68
Grafik 19	Perbandingan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker Tahun 2020-2022	69
Grafik 20	Perbandingan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker dengan Target RAK ...	70
Grafik 21	Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya.....	76
Grafik 22	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020-2022	77
Grafik 23	Perbandingan Realisasi Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan Target RAK.....	77
Grafik 24	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2022	82
Grafik 25	Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2022	84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dipimpin oleh Kepala Kantor memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta amanat International Health Regulation (IHR) Tahun 2005 melalui Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan terutama terkait koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (*PHEIC*) di pintu masuk negara dengan semua *stake holder* di pelabuhan dan bandara dan instansi terkait lainnya dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang baik pada level global, nasional maupun lokal daerah,

Untuk menghadapi kondisi tersebut di atas, melalui sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, akan dapat dicapai dengan hasil indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara / Pelabuhan / PLBDN tercapai 0.95 dari target 0.95 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai sebesar 100% dari target 99% dengan capaian kinerja 101,38%.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara tercapai sebesar 1 dari target 0.80 dengan capaian kinerja 124,56%.

Sedangkan sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, akan dapat dicapai dengan hasil indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja anggaran tercapai sebesar 88.31 dari target 83 dengan capaian kinerja 106,40%.
2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 93.59 dari target 90 dengan capaian kinerja 103,99%.

3. Kinerja implementasi WBK satker tercapai sebesar 77.80 dari target 75 dengan capaian kinerja 103,73%.
4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tercapai sebesar 84,42% dari target 80% dengan pencapaian kinerja 105,52%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian ini antara lain adalah program kegiatan telah dilaksanakan hampir di semua wilayah kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilakukan secara lebih terintegrasi dan dapat dioptimalkan serta adanya peningkatan dan perluasan target cakupan kegiatan di wilayah kerja dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 20,769,106,047,- atau 95,22% dari pagu anggaran sebesar Rp. 21,812,095,000,-.

Untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja Tahun 2022 yang merupakan tahap ketiga dari masa 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Periode 2020 – 2024, maka diperlukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Penguatan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM terutama dalam penguasaan teknologi dan informasi.
3. Peningkatan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan BBTCL PP Banjarbaru dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Penguatan Jejaring Kemitraan dan Koordinasi dengan instansi di wilayah pelabuhan dan bandara untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan kekarantina kesehatan.
5. Peningkatan dan penguatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala secara berjenjang di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin.

Selain itu, diperlukan pengembangan program kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang agar dapat lebih selaras dengan perkembangan penetapan dan upaya pencapaian indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan dan indikator kinerja program Ditjen P2P Kemenkes.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang kesehatan yang meliputi perubahan *mind-set* dan *culture-set* aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, dan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI merupakan salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan cegah tangkal penyakit sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dipertegas revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan serta amanat *International Health Regulation (IHR)* Tahun 2005, semakin memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan di pintu masuk Negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah digunakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Peraturan Presiden tersebut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah semakin menguatkan bahwa sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur sebagai salah satu persyaratan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan laporan kinerja perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang baik pada level global, nasional maupun lokal daerah, antara lain :

1. Pertemuan G20 Tahun 2022 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Tema ini diangkat dengan mempertimbangkan kondisi dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia, khususnya dibidang kesehatan yang akan membahas 3 isu global yaitu Pembangunan Sistem Ketahanan Kesehatan Global, harmonisasi standar protokol kesehatan global; serta pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang.
2. Kebijakan transformasi kesehatan yang terdiri dari 6 pilar yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan yang merupakan upaya perbaikan sistem kesehatan, untuk mengatasi ketimpangan kesehatan, baik di dalam negeri, maupun ketimpangan kesehatan antar negara.
3. Pelabuhan dan Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*).
4. Perkembangan teknologi dan pasar global mengakibatkan intensitas lalu lintas alat angkut yang semakin tinggi dan cepat, membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.
5. Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negative dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, social budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.
6. Berbagai fenomena di wilayah Kalimantan Selatan antara lain : peningkatan lalu lintas orang yang melakukan perjalanan internasional atau ibadah umrah, tingginya volume lalu lintas kapal dalam karantina atau dari luar negeri, dan adanya pertumbuhan industri dan tambang di kawasan Kalimantan Selatan yang mengakibatkan lalu lintas para ekspatriat dan para pekerja asing melalui bandara serta kemungkinan perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara baru di Wilayah Kalimantan Timur.

Berbagai isu strategis yang terjadi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Kementerian Kesehatan dalam upaya cegah tangkal penyakit menular dan potensial wabah di pintu masuk Negara.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkantor di daerah atau Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Klasifikasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. KKP secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin termasuk klasifikasi KKP Kelas II.

2. Tugas

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas II Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

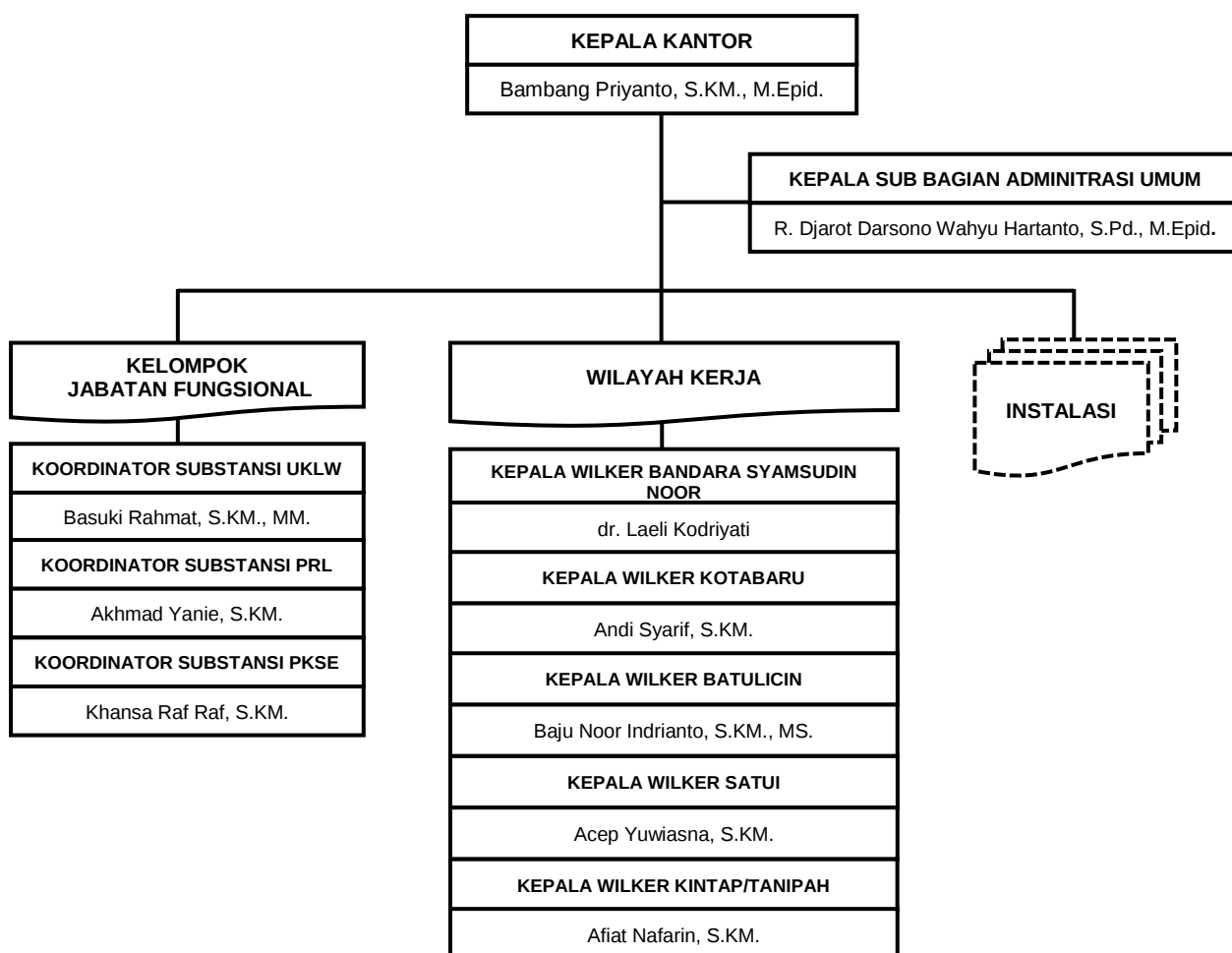
- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Sehubungan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka Menteri Kesehatan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang baru, sehingga struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum
2. Instalasi
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANJARMASIN



D. SUMBER DAYA MANUSIA

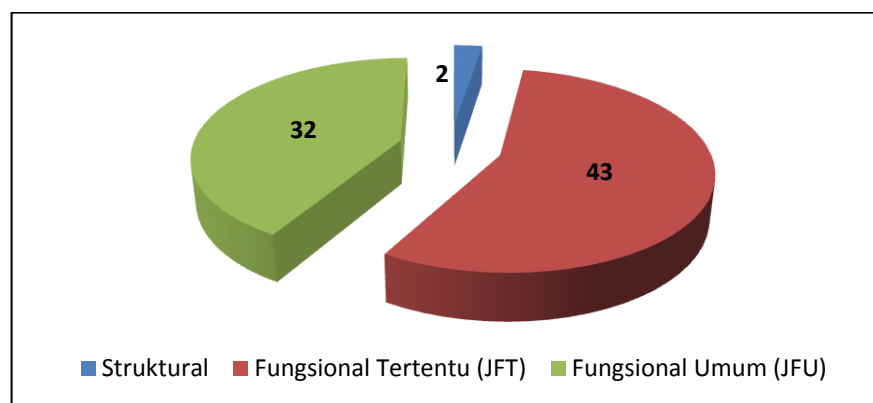
Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan Bulan Desember 2022 di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 76 orang, PPPK berjumlah 1 orang dan Tenaga PPNP berjumlah 35 orang.

Keadaan ini apabila dibandingkan dengan volume kegiatan dan beban kerja KKP Kelas II Banjarmasin masih sangat kurang. Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang kekuatan personil KKP Kelas II Banjarmasin sebagai berikut :

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Berdasarkan kelompok jabatan, dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Jabatan Struktural
- 2) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
- 3) Jabatan Fungsional Umum (JFU)



Grafik 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Dari grafik 1 menunjukkan bahwa pegawai KKP Kelas II Banjarmasin untuk Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 43 orang, dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 32 orang.

1) Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yaitu Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan Pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

2) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari 37 orang dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terdiri atas :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter Muda	1
2	Dokter Pertama	1
3	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	7
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	4
5	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	3
6	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2
7	Epidemiolog Kesehatan Terampil	1
8	Sanitarian Ahli Madya	1
9	Sanitarian Ahli Muda	2
10	Sanitarian Ahli Pertama	3
11	Sanitarian Mahir	1
12	Sanitarian Penyelia	2
13	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
14	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1
15	Entomolog Kesehatan Mahir	1
16	Perawat Mahir	3
17	Perawat Terampil	2
18	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1
19	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2
20	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1
21	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
22	Perencana Ahli Pertama	1
23	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
24	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
	Total	43

3) Jabatan Fungsional Umum (JFU)

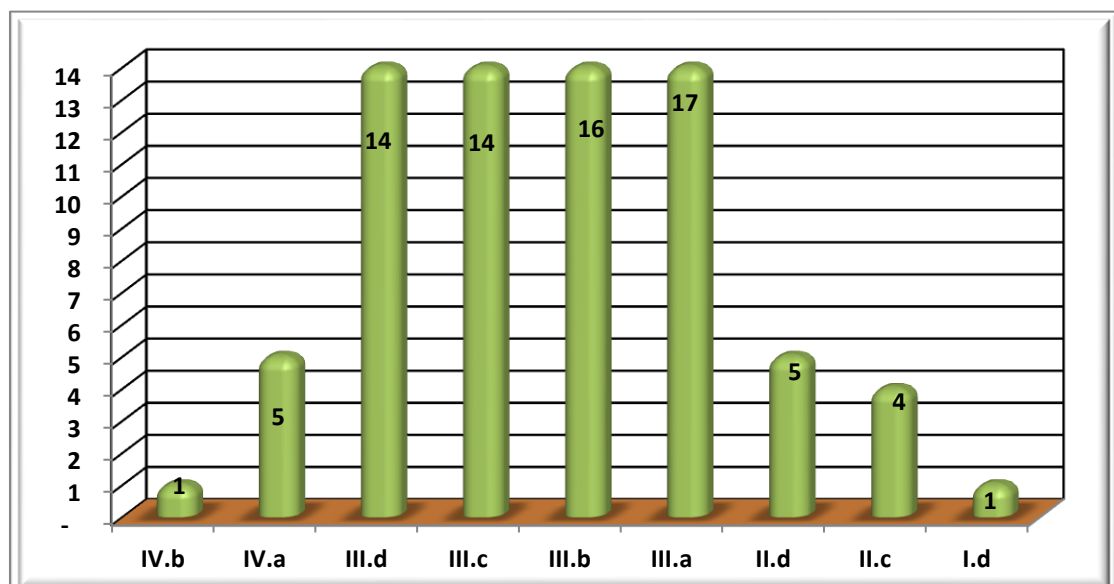
Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 32 orang dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) terdiri atas :

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter	5
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli	5
3	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
5	Epidemiolog Kesehatan	1
6	Perawat	5
7	Sanitarian Ahli	3
8	Sanitarian	3
9	Asisten Apoteker	1
10	Perencana	2
11	Analisis Keuangan	1
12	Pengelola BMN	1
13	Arsiparis	1
14	Pengemudi	1
	Total	32

b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

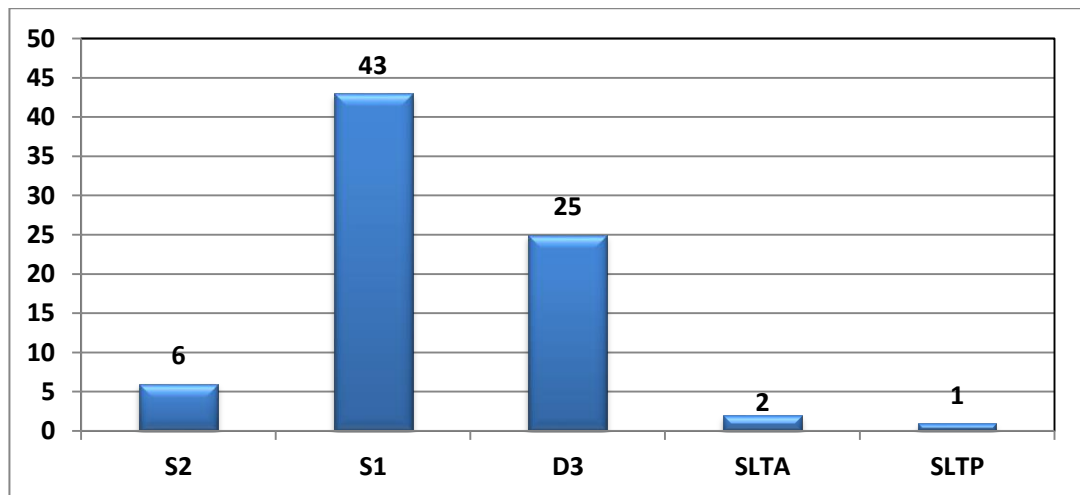
Golongan Ruang Pegawai yang terdapat pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin yang tertinggi Golongan IV.a dan terendah I.d. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada grafik 2 berikut ini :



Grafik 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

c. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pegawai KKP Kelas II Banjarmasin memiliki jenjang pendidikan tertinggi Pasca Sarjana (S2) dan terendah SMP. Untuk lebih jelasnya, data pegawai tersebut dapat dilihat pada grafik 3 berikut:



Garfik 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah yang memuat pencapaian program kegiatan dalam pencapaian tujuan kegiatan dengan segala faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menyelaraskan maksud dan tujuan penyusunan laporan ini, maka diperlukan Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 yang disusun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2461 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan yang terdiri dari :

1. Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)

Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2022.

3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2022, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja

4. Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam penyusunan perencanaan kinerja terdiri atas tiga instrumen yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Kinerja terdapat perjanjian kinerja yang merupakan tekad dan janji; rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran berbagai upaya untuk mencapai Visi, Misi, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi agar mencapai target kinerja pada tahun terakhir masa pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 – 2024 di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 - 2024

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis dengan didukung terlaksananya Rencana Strategis, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana / prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin mengacu pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020 - 2024 dan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang diambil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yaitu sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 -2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong”, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan.

Sebagai wujud kesinambungan, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi di bidang kesehatan yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”, dengan meingkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”, melalui Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit.

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni “Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko”, dengan meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk Negara, meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit melaksanakan berbagai upaya yang bersifat preventif dan promotif dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara.

Berbagai kegiatan yang dilakukan agar lebih jelas, fokus dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan Sasaran Strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.

Namun adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang baru, adanya revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI, hasil reuiu SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan masih ada indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi metode *SMART (Specific, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, Time Bound)*, serta pemahaman terhadap sumber data indikator kinerja kegiatan untuk setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan masih belum sama, sehingga terdapat perubahan atau penyesuaian nomenklatur beberapa indikator kinerja kegiatan beserta target kinerjanya.

Meskipun perubahan ini belum sepenuhnya terintegrasi pada semua proses monitoring evaluasi kinerja, khususnya pada aplikasi *e-performance* yang belum mengalami *update* sesuai dengan perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan yang berlaku sejak Juli 2022. Adapun perubahan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3. Perubahan Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Semula (Januari – Juni 2022)	Menjadi (Juli – Desember 2022)
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan sebesar 1,998,906 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 97% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 95 %	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN sebesar 0,95 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 99% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 0,80
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran sebesar 85 5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 93 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75 7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%	4. Nilai kinerja anggaran sebesar 83 5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 90 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75 7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 80%

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai hingga Tahun 2024 tersebut di atas, telah ditetapkan target kinerja setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 4. Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 -2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah						
1	Jumlah pemeriksaan orang alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.001.644	1.808.639	1,998,906	-	-
	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	-	-	0,95	0,96	0,97
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	99%	100%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	80	90	0,80	0,81	0,82

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						
4	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	83	84	85
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian lapora keuangan	80%	-	-	-	-
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	93	90	90	90
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	60%	80%	80%	80%

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil pencapaian kegiatan Tahun 2021 yang relevan dengan indikator kinerja kegiatan Tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020 -2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.95	1,925,367,000
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	530,593,000
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,80	121,720,000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83	472,750,000
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	18,391,038,000
		Kinerja implementasi WBK satker	75	197,747,000
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	172,880,000

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja KKP Kelas II Banjarmasin merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja Kepala KKP Kelas II Banjarmasin kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran KKP Kelas II Banjarmasin sampai akhir Tahun 2022. Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Banjarmasin merupakan penetapan atas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2024 yang setiap tahunnya dan telah mendapat persetujuan anggaran. Adapun sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai dalam dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.95	2,577,680,000
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,80	
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83	19,234,415,000
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	
		Kinerja implementasi WBK satker	75	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja organisasi adalah melalui mekanisme Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang tingkat capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang mengalami revisi pada Bulan Juli 2022 karena adanya revisi Renstra Kemenkes mengakibatkan penyesuaian pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin 2020 - 2024. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian
A	Capaian Kinerja Januari – Juni 2022				
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,998,906	1,636,207	81,86
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	100%	103,09
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	95%	38.47	40,49
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	85	28.95	34,06
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	91.60	98,49
		Kinerja implementasi WBK satker	75	81.44	108,59
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	32.33%	40,41
B	Capaian Kinerja Juli – Desember 2022				
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.95	0.95	100
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99	100%	101,01
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,80	1	125
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83	88.34	106,40
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	93.59	103,99
		Kinerja implementasi WBK satker	75	77.80	103,73
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	84,42%	105,52

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2022 terlihat dari hasil pencapaian masing-masing indikator dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya terkait hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan per sasaran strategis kegiatan mulai dari pengertian, definisi operasional, rumus / cara perhitungan, capaian indikator, Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RAK sampai dengan Tahun 2022, Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja Lain, Perbandingan

Capaian Kinerja Secara Nasional, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Indikator Pertama :

Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Adalah ukuran untuk menilai seberapa besar upaya deteksi faktor risiko penyakit yang telah dilakukan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN..

b. Definisi Operasional

Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar (Bobot dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*); Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal).

Adapun data capaian 4 parameter hasil pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang sesuai standar kekarantinaan kesehatan selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	% Capaian
Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai Standar	2,871,635	3,416,210	119
Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar	80,377	93,640	117
Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar	190	297	156
Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar	1,165	1,180	101

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator ini selanjutnya dilakukan perhitungan berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut :

Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Max	Cov Max	Score Max	Min	Score Min
2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	119	119	595	100	120	600		
Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	117	117	585	100	120	600		
Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120	360	100	120	360		
Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	101	101	505	100	120	600		
Total				2,045			2,160		0
				0.946759259					

Hasil perhitungan metode USG adalah sebesar 0.946759259 atau 0.95. Sedangkan capaian indeks adalah perbandingan realisasi dan target nilai indeks yang telah ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Nilai indeks yang dihasilkan

B = Nilai indeks yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian nilai indeks yang dihasilkan

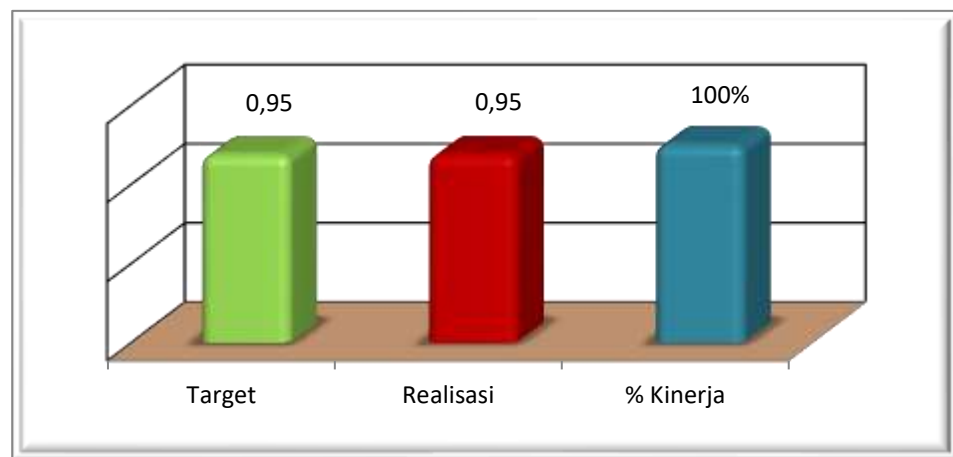
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN selama Tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{0.95}{0.95} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 4. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Dari grafik 4 menunjukkan bahwa capaian indikator Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN dapat tercapai sebesar 0.95 atau 100% dari target yang ditetapkan atau dengan kata lain semua parameter telah dilakukan deteksi faktor risiko penyakit baik di bandara/pelabuhan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator kinerja Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN ini merupakan hasil revisi atau penyesuaian indikator pada Tahun 2022, dimana terdapat perubahan nomenklatur indikator dengan yang ditetapkan pada Januari s.d Juni 2022 karena ada perubahan Renstra Kemenkes dan Hasil Reviu SAKIP Ditjen P2P terkait nomenklatur indikator kinerja yang memerlukan perubahan agar memenuhi kriteria SMART, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru berlaku sejak Juli 2022. Adapun perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Periode	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Reviu
Januari s.d Juni 2022	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Belum SMART
Juli s.d Desember 2022	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Penyesuaian nomenklatur agar memenuhi kriteria SMART

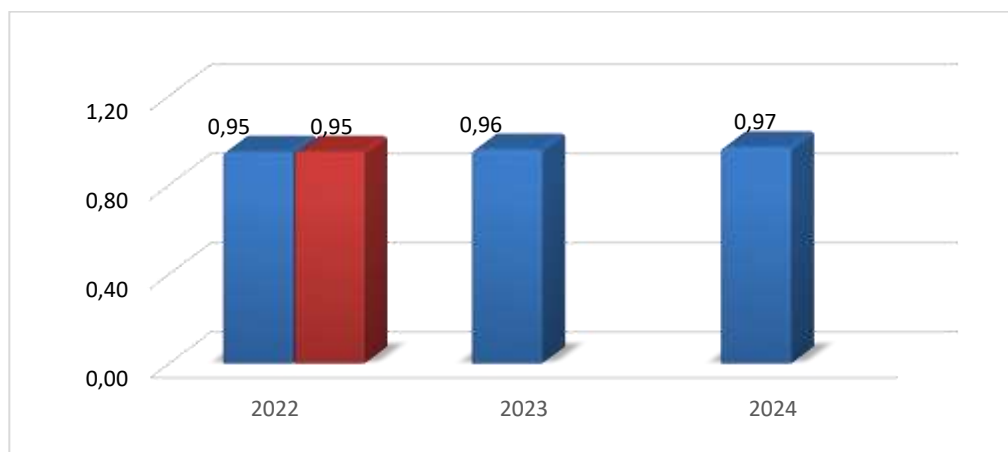
Adanya perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja kegiatan. Namun apabila dilihat dari data sasaran kegiatan dapat dilakukan perbandingan antara Tahun 2020 s.d 2022. Pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2020 terdapat peningkatan sasaran kegiatan orang, alat angkut dan barang, kondisi pandemic Covid-19 yang mulai

mereda dan lalu lintas orang, alat angkut, dan barang sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan atau transaksi antar daerah atau antara Negara, sedangkan cakupan sasaran lingkungan mengalami penurunan karena adanya penyesuaian titik lokasi pengawasan. Untuk lebih jelasnya data perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran Kegiatan	Hasil Pemeriksaan		
	2020	2021	2022
Jumlah Orang yang Diperiksa Sesuai Standar	1,987,384	2,215,359	3,416,210
Jumlah Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar	99,424	115,124	93,640
Jumlah Barang yang Diperiksa Sesuai Standar	165	264	297
Jumlah Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar	1,619	1,311	1,180

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024, baru dapat dibandingkan mulai Tahun 2022, karena merupakan tahun pertama setelah perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan Target RAK hingga Tahun 2024 sebagai berikut :



Grafik 5. Perbandingan Realisasi Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Target RAK

Dari grafik 5 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2022 sebesar 0.95 apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 0.97 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, menunjukkan bahwa masih masih dibawah target jangka menengah sebesar 0.02, namun dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya deteksi faktor risiko orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, kondisi tersebut seiring dengan peningkatan pengawasan di pintu masuk yang lebih intensif serta didukung dengan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor yang lebih baik.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2022. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2022 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	93 %	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	100%

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian KKP Se-Indonesia yang memiliki wilayah pengawasan bandara dan pelabuhan, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Capaian Indikator							
	KKP Kelas II Banjarmasin		KKP Kelas II Palembang		KKP Kelas II Panjang		KKP Kelas II Samarinda	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0.95	0.95	0.89	0.96	0.93	0.95	0.87	0.93

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 1 apabila dibandingkan dengan KKP Kelas II dengan cakupan layanan yang sama wilayah bandara dan pelabuhan tercapai lebih tinggi atau sama dengan target lebih rendah dan tercapai lebih rendah dengan target lebih rendah dari capaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin. Meskipun begitu, capaian kinerja masing-masing KKP dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sesuai kondisi volume kegiatan dan besarnya cakupan wilayah yang dilayani di pintu masuk negara pada satker masing-masing.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Meskipun terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan, tetapi apabila dilihat dari sasaran kegiatan tetap pada 4 parameter yang sama, sehingga capaian indikator kinerja Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat tercapai sebesar 0.95 atau 100% yang dipengaruhi oleh :

- a) Peningkatan kewaspadaan melalui pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas orang dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan dan bandara.
- b) Peningkatan pengawasan lalu lintas orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebagai upaya pengendalian pandemic covid-19;
- c) Kondisi pandemic covid-19 sudah melandai dan terkendali sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi tidak terlalu ketat mengakibatkan peningkatan jumlah lalu lintas orang dan alat angkut;
- d) Adanya kebijakan terkait syarat penerbangan dan pelayaran bagi pelaku perjalanan sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 ;
- e) Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu sesuai Instruksi Dirjen P2P;
- f) Perluasan titik lokus atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian risiko lingkungan hingga wilayah kerja;
- g) Penetapan target volume output kegiatan telah mengikuti kebijakan perencanaan kegiatan, namun perkembangan situasi kondisi aturan perjalanan sesuai Edaran Satgas Covid19 serta faktor alam berupa cuaca buruk di perairan Kalimantan Selatan turut mempengaruhi lalu lintas alat angkut dan penerbangan;
- h) Peningkatan kerjasama perdagangan antara Indonesia khususnya propinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa Negara di Asia antara lain China, Korea Selatan, Jepang, Philipine, Singapura, dan Malaysia;
- i) Pembangunan infrastruktur di dalam negeri dan pembangunan pelabuhan - pelabuhan baru , khususnya persiapan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Tengah yang terus dipacu oleh pemerintahan saat ini;
- j) Adanya dukungan peraturan perundangan-undangan untuk pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara.
- k) Komitmen bersama SDM pelaksana program di induk dan seluruh wilayah kerja dalam kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

Namun apabila dibandingkan Tahun 2021 yang tercapai 129 %, maka Tahun 2022 mengalami penurunan, karena adanya perubahan nomenklatur indikator kinerja

kegiatan dan metode penetapan target kinerja yang disebabkan revisi Renstra Kemenkes dan tindak lanjut evaluasi SAKIP Ditjen P2P.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

Walaupun capaian kinerja > 100 %, karena adanya upaya yang optimal dari pengelola kegiatan, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala atau masalah yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

- a) Adanya keterbatasan SDM kekarantinaan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan terutama untuk pengawasan pada wilayah Bandara Syamsudin Noor yang saat ini telah menjadi Bandara International dan saat ini belum sesuai dengan analisis beban kerja.
- b) Kurangnya respon dari pihak otoritas pelabuhan dan atau bandara (LPLS) dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara yang masih ditemukan belum sesuai ketentuan.
- d) Kurangnya update informasi masyarakat tentang persyaratan bagi pelaku perjalanan baik melalui udara ataupun laut mengenai vaksinasi dan pemeriksaan covid-19 sehingga kadang masih terjadi benturan /keributan antara pelaku perjalanan dan petugas.

Pemecahan Masalah :

- a) Saat ini upaya yang sudah dilakukan untuk pemenuhan SDM kekarantinaan yaitu melalui pengangkatan CPNS maupun mutasi pegawai dari instansi lain, dan pengangkatan tenaga relawan untuk melaksanakan pengawasan selama masa pandemic covid-19 di wilayah Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.
- b) Melaksanakan sosialisasi melalui media cetak berupa banner, leaflet, penyuluhan secara langsung pada saat proses validasi dan media online satker.
- c) Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial instagram tentang peraturan bagi pelaku perjalanan udara dan laut.
- d) Melakukan pendekatan lebih intensif berupa komunikasi cepat /langsung terhadap jejaring kerja (LPLS) di pelabuhan dan bandara.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja

dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : % Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$0,45\% = \frac{((Rp. 1,925,367,000 \times 100\%) - Rp. 1,916,650,675)}{Rp. 1,925,367,000} \times 100\%$$

$$51\% = 50 \% \frac{0,45\%}{20} \times 50$$

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat tercapai sebesar 0,95 dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1,916,650,675,-atau 99,55 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,925,367,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,45% dengan nilai efisiensi sebesar 51% untuk capaian kinerja sebesar 100 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pertimbangan sasaran yang sama dan keterbatasan tenaga pelaksana, perbedaan biaya pemeriksaan laboratorium sampel faktor risiko lingkungan antara laboratorium litbang di daerah dengan laboratorium kesehatan daerah provinsi juga berdampak terhadap penggunaan efisiensi anggaran

pelaksanaan kegiatan. Masa transisi pasca pandemic covid-19, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi serta peningkatan SDM tetap dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom atau aplikasi lainnya berbasis online, meskipun pertemuan secara luring sebagian kegiatan juga dilaksanakan. Hal ini berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

7) Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pelayanan Kesehatan Haji di Bandara

Berbeda dengan tahun sebelumnya, karena kondisi pandemic covid-19 mulai terkendali, sehingga penyelenggaraan haji Tahun 2022/1444 H dapat terlaksana, meskipun terdapat pengurangan kuota haji apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 atau sebelum pandemic covid-19 melanda. Sejalan dengan kebijakan ini, maka kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji pada masa Embarkasi dan Debarkasi sebagai upaya pengendalian kekarantinaan kesehatan dapat berjalan secara optimal dengan melibatkan berbagai lintas sektor dan program terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : pelayanan kesehatan pra embarkasi, embarkasi dan debarkasi serta pasca debarkasi dengan sasaran sebanyak 2,512 orang jamaah haji, melalui optimalisasi kegiatan dengan sasaran jamaah umrah sebanyak 988 orang, sehingga target 3,500 dapat tercapai (100%).

b) Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang akan melintasi pelabuhan dan bandara dapat terlayani dengan baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelayanan kesehatan situasi khusus, pelayanan vaksinasi, verifikasi terhadap rumah sakit dan klinik yang mengajukan persetujuan pelayanan vaksinasi internasional,

pengawasan terhadap rumah sakit dan klinik yang melaksanakan penerbitan dokumen ICV, melakukan pertemuan evaluasi LP/LS dan Klinik/RS penerbitan dokumen ICV di wilayah kerja dengan sasaran sebanyak 10,000 orang (100%).

c) Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan dan bandara terutama dalam pengendalian penyakit HIV AIDS dan TB serta pemeriksaan alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/Wabah/KKM sebanyak 2 layanan (100%).

d) Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan dan Tempat-tempat Umum

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau kondisi sanitasi lingkungan berupa suhu, kelembaban, pencahayaan, kelengkapan sarana sanitasi dasar dan kebisingan di tempat-tempat umum, gedung perkantoran di lingkungan pelabuhan dan bandara. Lokus sasaran sebanyak 288 lokus (100 %).

e) Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau kondisi sanitasi laik fisik tempat pengelolaan pangan (TPP) yang beroperasi di wilayah pelabuhan dan bandara. Lokus sasaran inspeksi sebanyak 312 lokus (100 %).

f) Inspeksi Sanitasi Penyediaan Air Bersih (ISPAB)

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau kondisi sanitasi sarana penyediaan Air Bersih berupa reservoir, jaringan perpipaan, kran /hydran yang terdapat di wilayah pelabuhan dan bandara. Lokus sasaran inspeksi sebanyak 204 lokus (100%).

g) Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan bakteriologis dan kimia lengkap sampel air bersih yang diambil dari instalasi penyediaan Air Bersih berupa reservoir, jaringan perpipaan, kran /hydran yang terdapat di wilayah pelabuhan dan bandara. Semua sampel dikirim ke laboratorium kesehatan daerah setempat yang terakreditasi. Lokus sasaran sampel sebanyak 168 lokus (100 %).

h) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Pes

Kegiatan yang dilakukan yaitu :

(1) Pemetaan

Pemetaan daerah Perimeter yang menjadi tempat potensial berkembangbiakan tikus di pelabuhan/bandara. Membagi titik lokasi untuk memudahkan pengawasan / pengendalian.

(2) **Persiapan Bahan dan Alat**

Melakukan pengadaan bahan operasional kegiatan untuk pelabuhan induk dan semua wilayah kerja berupa : umpan tikus, karung tikus, handscoon, masker, kapas, stiker, sisir rapat, dan kantong kresek

(3) **Pemasangan Perangkap Tikus**

Dilaksanakan dengan memasang perangkap tikus pada bangunan-bangunan di area pelabuhan induk dan semua wilayah kerja dengan target seluas 63 hektar. Jumlah perangkap tikus disesuaikan dengan luas dan kondisi setiap pelabuhan dan bandara.

(4) **Identifikasi Tikus dan Pinjal**

Melakukan pengadaan bahan operasional kegiatan untuk pelabuhan induk dan semua wilayah kerja berupa alkohol dan alat tulis kantor untuk pelaksanaan administrasi kegiatan. Kegiatan identifikasi yaitu tikus yang tertangkap akan disisir untuk mendapatkan pinjalnya, selanjutnya dilakukan identifikasi jenis /spesiesnya untuk mendapatkan angka Index Pinjal yang merupakan indikator tingkat kepadatan vektor pembawa penyakit Pes di pelabuhan. Pengendalian dilakukan pada saat ditemukan hasil indeks pinjal > 1 dengan capaian kegiatan selama satu tahun sebesar 100%.

i) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit DBD

Kegiatan yang dilakukan berupa Survei larva *Aedes aegypti* yang dilakukan dengan sistem Random Sampling pada bangunan / rumah yang menjadi sampel pengamatan dengan metode inspeksi (visual) di daerah Buffer, dan pada semua bangunan di area perimeter pelabuhan induk dan wilayah kerja seluas 90 hektar (100%). Survei ini melibatkan warga masyarakat (kader) dari daerah buffer/penyangga pelabuhan. Hasil survey yang ditemukan/ positif jentik akan langsung dibubuhkan larvasida pembunuh jentik.

j) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Malaria

Kegiatan yang dilakukan berupa :

(1) **Survei perindukan Jentik Anopheles**

Survey jentik *Anopheles* dilaksanakan di wilayah kerja endemis dengan kondisi geografis banyak terdapat danau / laguna yang berpotensi menjadi tempat perindukan vektor malaria (*Anopheles* sp.).

(2) **Survey Nyamuk Anopheles**

Survey Nyamuk *Anopheles* dilaksanakan di wilayah kerja endemis yaitu di pelabuhan wilayah kerja Kotabaru, Batulicin, Satui, Tanipah, dan Pos Sungai Puting , secara rutin 2 kali setahun atau 6 bulan sekali dengan target tercapai seluas 12 Hektar (100%).

k) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Diare

Survey vektor penyakit Diare atau Survey Lalat dilakukan dengan mengukur kepadatan populasi lalat dengan alat fly grill pada tempat – tempat yang berpotensi mengundang lalat di area perimeter pelabuhan dan bandara. Target luar area yang dilakukan survey Tahun ini seluas 28 Hektar untuk pelabuhan induk dan wilayah kerja dan tercapai 100%.

l) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian HIV AIDS yang berkoordinasi dengan petugas dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Adapun sasaran layanan ini adalah yang memiliki potensi berisiko terkena HIV AIDS di pelabuhan/ bandara seperti TKBM di pelabuhan, perusahaan pelayaran, masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara, serta instansi pemerintah disekitar pelabuhan dan bandara sebanyak 6 layanan atau 616 orang yang diperiksa atau 123,2 % dari target 5 layanan (500 orang).

m) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit TB

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka deteksi dini terduga TB di seluruh wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin yang berkoordinasi dengan petugas dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Adapun sasaran layanan ini adalah yang memiliki potensi berisiko terkena TB Paru di pelabuhan/bandara seperti TKBM di pelabuhan, perusahaan pelayaran, masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara, instansi pemerintah disekitar pelabuhan dan bandara sebanyak 12 layanan atau 616 orang yang diperiksa atau 123,2 % dari target 10 layanan (500 orang).

n) Pengadaan Alat / Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor dan BPP, sanitasi lingkungan dan bahan/alat medis dan non medis untuk pelayanan di pintu masuk serta penanganan covid-19 sebanyak 4 paket (100 %).

Indikator Kedua :

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

a. Pengertian

Adalah pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang telah dilakukan pemeriksaan di pintu masuk. Angka ini menggambarkan besaran faktor risiko yang telah ditemukan dari hasil pemeriksaan dan telah dilakukan tindakan pengendalian.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang alat angkut barang dan lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan

B = Jumlah faktor risiko yang ditemukan

% C = Persentase pencapaian faktor risiko yang dikendalikan

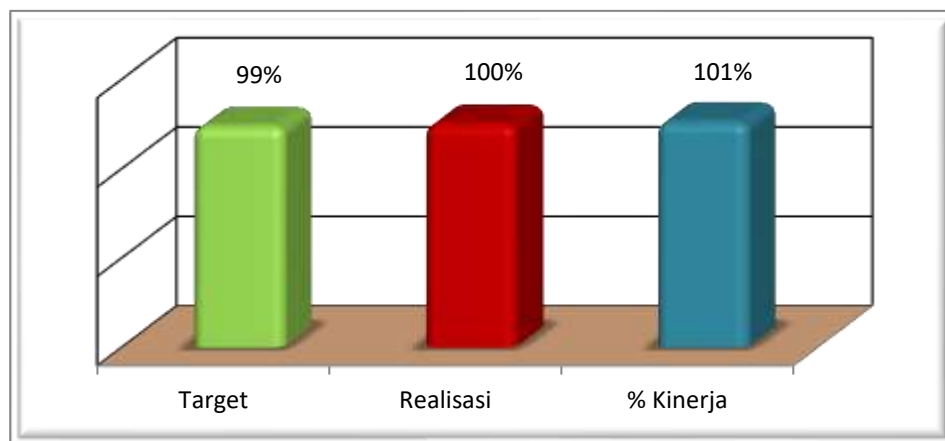
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan selama Tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{100\%}{99\%} \times 100\% = 101\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 6. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Dari grafik 6 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dapat tercapai > 99% yaitu sebesar 100% dari faktor risiko yang ditemukan atau 101% dari target yang ditetapkan atau dengan kata lain semua faktor risiko dapat dikendalikan yaitu pemeriksaan orang sebanyak 8,155 orang, pemeriksaan alat angkut sebanyak 24 kapal, pemeriksaan barang sebanyak 1 jenazah, dan pemeriksaan lingkungan sebanyak 69 titik/lokasi.

Adapun data rincian hasil pengawasan faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Kegiatan	FR yang ditemukan	FR yang dikendalikan	% Capaian
Pemeriksaan Orang	8,155	8,155	100
Pemeriksaan Alat Angkut	24	24	100
Pemeriksaan Barang	1	1	100
Pemeriksaan Lingkungan	69	69	100

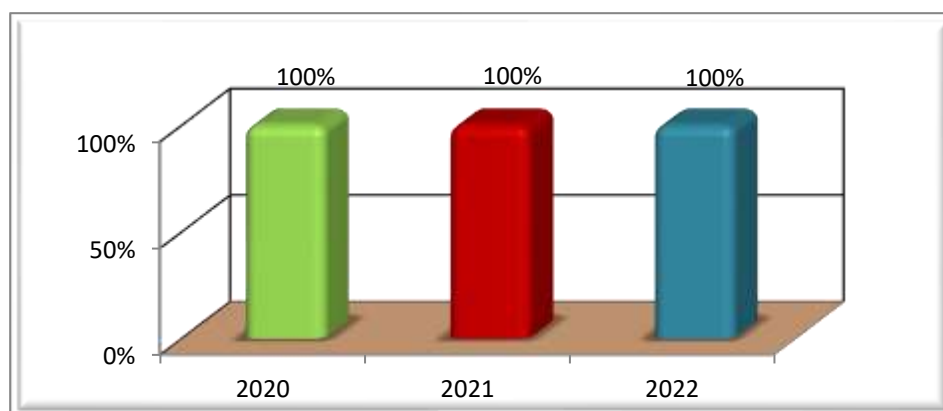
2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 masih sama dengan 2020 – 2021 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya.

Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2020 - 2022 dapat tercapai 100% dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Capaian kinerja ini dapat tercapai karena adanya sinergi para pengelola program dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan faktor risiko dan upaya pengendalian yang segera dilakukan untuk semua faktor risiko yang ditemukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini perbandingan hasil pengawasan faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan :

Kegiatan	Faktor Risiko yang Ditemukan			Faktor Risiko yang Dikendalikan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pemeriksaan Orang	1,817	1,552	8,155	1,817	1,552	8,155
Pemeriksaan Alat Angkut	31	41	24	31	41	24
Pemeriksaan Barang	165	264	1	165	264	1
Pemeriksaan Lingkungan	454	460	69	454	460	69

Sedangkan apabila dilihat dari persentase capaian bahwa semua faktor risiko yang ditemukan pasti akan dikendalikan dari target yang ditetapkan, maka hasil perbandingan realisasi Tahun 2020 s.d 2022 sebagai berikut :

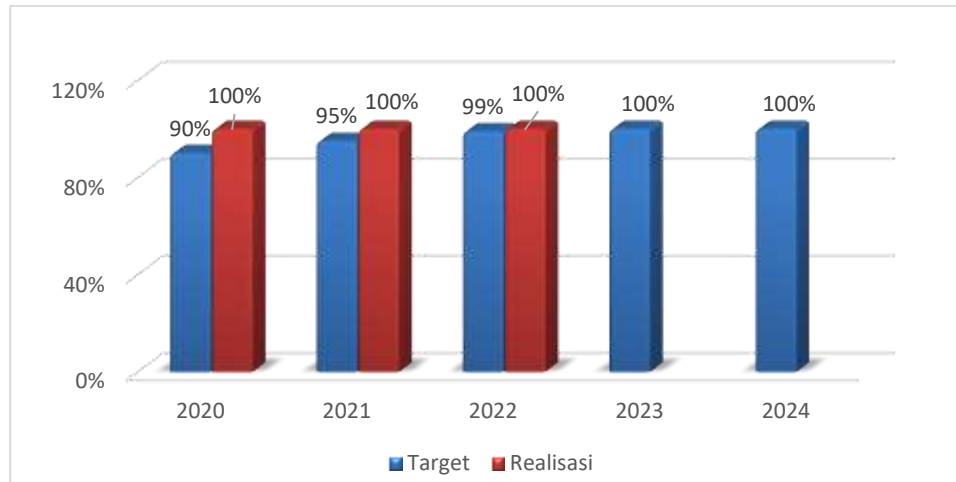


Grafik 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s.d 2022

Dari grafik 7 menunjukan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2022 semua faktor risiko yang ditemukan dapat dikendalikan dengan baik dan telah dilakukan tindakan sesuai kondisi masing-masing faktor risiko.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun ketiga dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan 2022 yaitu sebesar 100% atau 101 % dari target sebesar 99%.



Grafik 8. Perbandingan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2022 telah tercapai sesuai target jangka menengah hingga 2024 sebesar 100% yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Meskipun mengalami penurunan dari sisi capaian kinerja, akibat perubahan cara penetapan target kinerja yang lebih besar dan mengikuti hasil progres capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu menjadi 99%, serta adanya upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk yang telah dilakukan secara optimal, seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2022. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2022 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	93%	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	101%

Perbandingan capaian kinerja dengan indikator RAP dapat tercapai melebihi target nasional dengan capaian kinerja 101 % menunjukan bahwa faktor risiko di pintu masuk negara dapat dikendalikan dengan seluruhnya.

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian KKP Se-Indonesia yang memiliki wilayah pengawasan bandara dan pelabuhan, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Capaian Indikator							
	KKP Kelas II Banjarmasin		KKP Kelas II Palembang		KKP Kelas II Panjang		KKP Kelas II Samarinda	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	99%	100%	97%	100%	97%	100%	97%	100%

Dari data tersebut di atas, menunjukan bahwa capaian kinerja pada indikator 2 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata semua tercapai 100% melebihi target satker dan rata-rata nasional. Hal ini menunjukan bahwa masing-masing KKP semua faktor risiko yang ditemukan telah dilakukan pengendalian dengan baik dan optimal di semua pintu masuk negara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan yang tercapai 101% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yang tercapai 105% tetapi dapat tercapai > 100%, hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Penetapan target yang lebih besar dari tahun sebelumnya karena adanya perubahan metode penetapan target.
- 2) Peningkatan intensitas pengawasan lalu lintas orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- 3) Pemeriksaan orang, barang, dan alat angkut dalam karantina hanya dilakukan pada kedatangan kapal dari negeri.
- 4) Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu sesuai Instruksi Dirjen P2P.
- 5) Penguatan kapasitas SDM dalam penanganan KKM di Pintu masuk.
- 6) Penguatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kapasitas SDM di Pintu Masuk.

- 7) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian risiko lingkungan hingga wilayah kerja.
- 8) Dukungan peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di pintu masuk.

Adapun upaya pengendalian yang dapat dilakukan pada masing-masing faktor risiko dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
Pemeriksaan Orang	Rujukan	Pasien yang akan dirujuk lokasi pengangkutan bisa dari muara laut	Sarana transportasi air yang digunakan harus aman dan nyaman bagi pasien dan petugas	Substansi UKLW	Agen pelayaran, Otoritas Bandara	Agen pelayaran : Menyediakan transport yang aman dan nyaman Otoritas Bandara : Menghimbau dan mengawasi agen pelayaran dalam menyediakan transportasi yg sesuai
		Keterlambatan tindakan penanganan oleh Faskes Rujukan baik untuk ABK maupun Calon Jamaah Haji terkait pembiayaan	Koordinasi dengan Faskes Rujukan	Substansi PKSE	Faskes Rujukan, BPJS	Fasyankes Rujukan : Menyediakan dan memberikan layanan BPJS terkait pembiayaan
	Laik Terbang	Pelaku perjalanan banyak yang tidak memahami tentang persyaratan kesehatan dalam melakukan perjalanan baik laut maupun udara	Pengadaan Alat/bahan sebagai media informasi bagi pelaku perjalanan dan memasang di media online dan banner/poster/space iklan yang ada di pelabuhan dan bandara	Substansi UKLW	PT. Pelinda & PT. Angkasa Pura	PT. Pelinda & PT. Angkasa Pura : Menyediakan tempat untuk memasang media informasi
		Surat ijin laik terbang tidak bisa terbit karena adanya gangguan aplikasi Sinkarkes	Koordinasi dengan Penanggungjawab Aplikasi Sinkarkes Subdit SKK	Substansi PKSE	Subdit SKK Ditjen P2P	Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait <i>maintenance</i> aplikasi Sinkarkes
	Ijin Angkut Orang Sakit	Pasien dan pihak keluarga kurang memahami persyaratan tentang pengangkutan orang sakit baik lewat Laut maupun udara sehingga pengangkutan pasien tidak bisa langsung dilakukan karena harus melengkapi persyaratan	Pengadaan Alat/bahan sebagai media informasi bagi masyarakat untuk dimasukkan di media online dan banner/poster/space iklan yang ada di pelabuhan dan bandara	Substansi UKLW	PT. Pelindo, PT. Angkasa Pura	PT. Pelinda & PT. Angkasa Pura : Menyediakan tempat untuk memasang media informasi
		Surat ijin angkut orang sakit tidak bisa terbit karena adanya gangguan aplikasi Sinkarkes	Koordinasi dengan Penanggungjawab Aplikasi Sinkarkes Subdit SKK	Substansi PKSE	Subdit SKK Ditjen P2P	Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait <i>maintenance</i> aplikasi Sinkarkes
	Vaksinasi Meningitis	Jumlah vaksin yang didistribusikan ke KKP Kelas II Banjarmasin kurang mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap vaksin MM	Mengarahkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi ke fasilitas kesehatan yang diberikan izin untuk penerbitan ICV	Substansi UKLW	PPIU, Faskes yang mempunyai izin penerbitan ICV	PPIU : Memberikan informasi kepada Jamaah Umroh Faskes : Memberikan pelayanan yang sesuai standar kes bagi calon jamaah Umroh
		Penerbitan ICV tertunda karena adanya gangguan aplikasi Sinkarkes	Koordinasi dengan Penanggungjawab Aplikasi Sinkarkes Subdit SKK	Substansi PKSE	Subdit SKK Ditjen P2P	Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait <i>maintenance</i> aplikasi Sinkarkes

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
	Vaksinasi Yellow Fever	Jumlah vaksin yang didistribusikan ke KKP Kelas II Banjarmasin kurang mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap vaksin MM	Mengarahkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi ke fasilitas kesehatan yang diberikan izin untuk penerbitan ICV	Substansi UKLW	Agen Pelayaran, Faskes yang mempunyai izin penerbitan ICV	Agen pelayaran : Memberikan informasi kepada ABK Faskes : Memberikan pelayanan yang sesuai standar kes bagi ABK
		Penerbitan ICV tertunda karena adanya gangguan aplikasi Sinkarkes	Koordinasi dengan Penanggungjawab Aplikasi Sinkarkes Subdit SKK	Substansi PKSE	Subdit SKK Ditjen P2P	Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait <i>maintenance</i> aplikasi Sinkarkes
	Tolak Berangkat di Bandara/ Pelabuhan	Pelaku Perjalanan tidak Kooperatif	Diberikan edukasi kepada ybs ttg persyaratan bagi pelaku perjalanan melalui Media offline maupun online di bandara dan pelabuhan	Substansi UKLW	PT. Pelindo, Maskapai & Agen Pelayaran, PT. Angkasa Pura, pihak keamanan bandara dan pelabuhan	PT. Pelindo & PT. Angkasa Pura : Menyediakan tempat untuk memasang media informasMaskapai & Agen Pelayaran : Memberikan informasi kepada pengguna jasa Pihak keamanan Bandara dan Pelabuhan : Memberikan keamanan bagi petugas
	Rekomendasi Perjalanan	Keterlambatan penerbitan surat rekomendasi perjalanan bagi Calon Jamaah Haji yang positif karena hasil pemeriksaan penunjang belum dilengkapi	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota domisili Calon Jamaah Haji	Substansi PKSE	Dinas Kesehatan Kota Setempat, PPIH Embarkasi Banjarmasin, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel	Dinas Kesehatan Kota Setempat : Koordinasi dengan Labkesda terkait hasil pemeriksaan penunjang PPIH Embarkasi Banjarmasin : Pengaturan jadwal kloter Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel : Menerbitkan surat rekomendasi perjalanan
Pemeriksaan Alat Angkut	Tindakan Penyehatan Alat Angkut/ SSCC (Desinfeksi, Desinseksi dan Deratisasi)	Pihak owner alat angkut (Kapal penumpang/komersial) yang high risk menolak dilakukan tindakan pengendalian pada kapalnya dengan alasan kapal harus segera berangkat dan terancam merugi sehingga fumigasi batal dilaksanakan.	Memberikan Ijin berlayar 1x dan direkomendasikan dilakukan tindakan penyehatan (fumigasi) di pelabuhan tujuan.	Substansi PRL	Otoritas Pelabuhan (KSOP dan KUPP) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, Agen Pelayaran kapal yang bersangkutan , Pest Control yang ditunjuk	Otoritas Pelabuhan: Membantu Mengamankan Kapal dalam rangka kegiatan penyehatan Agen Pelayaran: Melakukan Koordinasi antara Pihak Kapal dengan petugas dan Pest Kontrol yang ditunjuk dan Menyiapkan Sarana Transportasi Pest Kontrol: Melakukan Tindakan Penyehatan (fumigasi/desinseksi) pada kapal
	Tindakan Karantina	Adanya penolakan dari pihak keagenan kapal	Memberikan edukasi terkait peraturan Kekarantinaan dan tindakan karantina kepada keagenan kapal	Substansi PKSE	Keagenan Kapal	Kooperatif terhadap tindakan karantina
		Fasilitas penunjang untuk karantina sudah ditiadakan oleh Tim Gugus Covid19	Koordinasi dengan Dinas kesehatan dan gugus tugas Covid 19 untuk menyediakan fasilitas karantina, Koordinasi dengan Faskes dan keagenan kapal agar dapat dilakukan karantina di Rumah Sakit	Substansi PKSE	Dinas Kesehatan Kota Setempat, Tim Gugus Tugas Covid 19, Keagenan Kapal dan Fasyankes	Dinas Kesehatan Kota Setempat : Koordinasi dengan Tim Gugus Covid19 Tim Gugus Covid19 : Memberikan rekomendasi faskes karantina Keagenan Kapal : Menyediakan sarana dan prasarana penunjang Fasyankes : Menyediakan layanan dan ruang karantina

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
	Desinseksi/ Desinfeksi pesawat	Pihak maskapai tidak berkenan untuk dilakukan tindakan karena memiliki prosedur penanganan sendiri	Memberikan penjelasan terkait ketentuan tindakan desinseksi/desinfeksi pesawat harus segera dilakukan apabila terdapat kondisi faktor risiko	Substansi PRL	Maskapai, PT. Angkasa Pura	Maskapai : Kooperatif terhadap tindakan yang dilakukan PT. Angkasa Pura : Melakukan koordinasi dengan pihak Maskapai agar kooperatif terhadap tindakan yang akan dilakukan
	One Month Extention	Kurangnya pemahaman pihak keagenan kapal terkait pemberian One Month Extention (Sertifikat Sanitasi Kapal Perpanjangan 30 hari)	Memberikan penjelasan terkait pemberian One Month Extention (Sertifikat Sanitasi Kapal Perpanjangan 30 hari)	Substansi PRL / PKSE	Keagenan Kapal	Berkoordinasi dengan pemilik kapal dan keagenan pada pelabuhan berikutnya untuk dapat dilakukan tindakan sanitasi
Pemeriksaan Barang	Tidak Berangkat/ Tunda Berangkat Sampai Dokumen Lengkap	Kurangnya pemahaman pihak keluarga terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan	Memberikan informasi terkait syarat kelengkapan dokumen	Substansi UKLW	Cargo, Rumah Sakit, Maskapai	Cargo : Memberikan rekomendasi fasyankes yang memiliki standar pengepakan jenazah Rumah Sakit : Pengepakan jenazah sesuai standar penerbangan Maskapai : Memeriksa kelengkapan dokumen untuk pengiriman jenazah
	Berangkat dengan Status Bebas Faktor Risiko	Pengiriman kerangka jenazah dengan riwayat Covid19	Memberikan informasi terkait dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Kepolisian dan Surat keterangan Penyebab Kematian Bukan Karena Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan setempat	Substansi UKLW	Rumah Sakit, Kepolisian, Dinkes setempat	Rumah Sakit : Pengepakan kerangka jenazah sesuai standar Kepolisian : Penerbitan Surat Keterangan Penyebab Kematian Dinkes setempat : Penerbitan Surat Keterangan Penyebab Kematian Bukan Karena Penyakit Menular
	Spraying	Kondisi sanitasi pelabuhan atau terminal penumpang cenderung sering dijumpai kepadatan lalat Tinggi akibat pengangkutan sampah tidak dilakukan setiap hari dan sering terlambat	Memberikan rekomendasi perbaikan pada otoritas pelabuhan dan pihak pengelola sarana sanitasi dasar di wilayah pelabuhan untuk melakukan pengelolaan sampah yang tepat	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin, PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin,	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
		Masih cukup tingginya kepadatan lalat di wilayah Pelabuhan Banjarmasin	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak operator pelabuhan (PT. Pelindo III Banjarmasin) terkait perbaikan sanitasi lingkungan pelabuhan	Substansi PRL	KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
	Abatisasi	Masyarakat menganggap fogging lebih efektif menekan penyebaran vektor DBD (lebih menyukai Fogging daripada larvaciding) , bila ada RT yang difogging maka RT lain akan minta difogging walaupun HI masih memenuhi syarat ($HI < 1$)	Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kader kesling yang telah dilatih	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin, PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin, KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap, Kelurahan setempat, dan Puskesmas setempat	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan) : Mengelola sarpras di pelabuhan Puskesmas : memberikan data awal kasus DBD dan Membantu edukasi kader

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
		SDM yang terlatih tentang alat fogging (service dan perbaikan alat) masih kurang	Peningkatan SDM Entomolog Kesehatan dan Sanitarian berupa pelatihan tentang alat /mesin fogging	Substansi PRL	Direktorat P2PTVZ ,Balai Litbangkes	Direktorat P2PTVZ :Pengawasan dalam Menyelenggarakan pelatihan. Balai Litbangkes: Menyelenggarakan Pelatihan
		Sulit mendapatkan kader laki - laki, sebagian besar kader yang dilatih adalah ibu-ibu sehingga agak merepotkan pada saat dilakukan kegiatan yang perlu kekuatan fisik (misal: fogging)	Memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendukung tugas kader kesling dalam rangka mewujudkan wilayah bebas vektor DBD	Substansi PRL	Kelurahan setempat dan Puskesmas setempat	Kelurahan : memberikan data surveilens kasus DBD Puskesmas : memberikan data awal kasus DBD RT setempat
	Fogging	Fogging sebagai upaya SKD (sistem kewaspadaan dini) diperlukan dalam rangka mitigasi tingginya angka house index vektor DBD, namun warga masyarakat di salah satu lokus wilayah kerja menolak difogging selama tidak ada kasus infeksi DBD meskipun di lingkungannya kepadatan vektor /House Index > 1	Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kader kesling yang telah dilatih	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin, PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin, KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap, Kelurahan setempat, dan Puskesmas setempat	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan) : Mengelola sarpras di pelabuhan Puskesmas : memberikan data awal kasus DBD dan Membantu edukasi kader
	Perangkap	Wilayah pelabuhan laut masih menduduki angka <i>trap rate</i> (perangkap sukses) lebih tinggi daripada wilker bandara terkait kondisi sanitasi lingkungan sekitarnya. Atau dapat dikatakan tikus tertangkap di wilker pelabuhan lebih banyak daripada tikus yang tertangkap di wilker bandara	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak operator pelabuhan (PT. Pelindo III Banjarmasin) terkait perbaikan sanitasi lingkungan pelabuhan	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin, PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin, KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
		Sering hilang atau rusaknya perangkap tikus saat selesai pemasangan sehingga mengurangi stock perangkap	Pengadaan perangkap tikus setiap tahun anggaran	Substansi PRL	pihak penyedia barang operasional	Pihak penyedia : menyediakan barang sesuai order kebutuhan
	Rekomendasi Perbaikan Kualitas Air Bersih TMS	Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pelabuhan/bandara	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
	Rekomendasi Perbaikan Makanan & Alat TMS	Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pelabuhan/bandara dengan alasan keterbatasan anggaran	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
	Rekomendasi perbaikan Kualitas TTU	Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pelabuhan/bandara dengan alasan keterbatasan anggaran	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

CKi : % Capaian Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50\% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$5,62\% = \frac{((Rp. 530,593,000 \times 101\%) - Rp. 506,097,973)}{Rp. 530,593,000} \times 100\%$$

$$64\% = 50\% \frac{5,56\%}{20} \times 50$$

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat tercapai sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 101 % dari target yang telah ditetapkan 99% dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 506,097,973,- atau 95,38% dari pagu anggaran sebesar Rp. 530,593,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,56% dengan nilai efisiensi sebesar 64% untuk capaian kinerja sebesar 101%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah adanya pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan yang bersifat sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dan pembiayaan terintegrasi dengan penanganan covid-19, adanya perbedaan tarif pemeriksaan sampel faktor risiko lingkungan antara layanan BBTCL PP Banjarbaru dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalsel, selain juga adanya anggaran kegiatan terkait embarkasi haji (pertemuan penjamah catering haji Tahun 2021) yang batal dilaksanakan Tahun ini. Masa transisi pasca pandemic covid-19, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi serta peningkatan SDM tetap dilaksanakan secara *daring* melalui aplikasi zoom atau aplikasi lainnya berbasis *online*, meskipun pertemuan secara *luring* sebagian kegiatan juga dilaksanakan. Hal ini berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko lingkungan di pintu masuk dan embarkasi, antara lain : pemeriksaan kesehatan penjamah makanan TPM Pra Embarkasi, pemeriksaan dan pengendalian sanitasi lingkungan Asrama Haji, survey dan pengendalian vector dan BPP Asrama Haj, pengawasan / pemeriksaan kualitas air di pelabuhan dan bandara, pemeriksaan kualitas makanan di pelabuhan dan bandara, pemeriksaan kualitas tempat-tempat umum di pelabuhan dan bandara, pemeriksaan kualitas udara dan kebisingan di pelabuhan dan bandara, pengawasan dan pengendalian limbah B3 di pelabuhan, uji resistensi insektisida, dan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sebanyak 2 layanan (100 %).

2) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kekarantinaan kesehatan di bandar udara yaitu Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru, Bandara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dan Bandara Bersujud Batulicin sebanyak 200 layanan (100 %).

3) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dimana terjadi lonjakan jumlah lalu lintas orang, alat angkut dan barang pada tempat dan waktu yang bersamaan saat libur Hari Raya, Natal dan Tahun baru yang dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi di Pelabuhan laut penumpang yaitu Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Batulicin dan 3 (tiga) lokasi di Bandar udara yaitu Bandara Samsudin Noor Banjarbaru, Bandara Bersujud Batulicin, dan Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru. Pelayanan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan surveilans faktor risiko kesehatan dalam kondisi matra, pengawasan alat angkut dan barang yang berpotensi menimbulkan faktor risiko penyakit yang dikirim menggunakan kapal atau pesawat, pelayanan kesehatan poliklinik terbatas, dan pengendalian risiko lingkungan dengan sasaran sebanyak 120 layanan (100 %).

4) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit DBD di pintu masuk Bandara/Pelabuhan berupa melaksanakan fogging (pengasapan) di area perimeter pelabuhan dan bandara dengan target seluas 38 Hektar sebagai tindakan kewaspadaan dini dan atau fogging fokus / sewaktu – waktu bila terjadi kasus DBD (kejadian luar biasa) di area buffer . Fogging pengendalian faktor risiko penyakit DBD Tahun ini terlaksana seluas 38 hektar (100 %).

5) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit diare di pintu masuk Bandara / Pelabuhan berupa Spraying Lalat, yaitu melakukan pengendalian lalat dengan alat spray can dan insectisida cair (Solfac) bila hasil pengukuran kepadatan lalat Tinggi (> 2 ekor) tercapai seluas 21 hektar (100 %).

6) Pelayanan Kegawatdaruratan dan Rujukan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka lanjutan dari upaya deteksi dini terhadap kasus gangguan kesehatan / kegawatdaruratan / kemungkinan ditemukan kasus kegawatdaruratan di Bandara/Pelabuhan yang memerlukan tindakan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan yang tercapai sebanyak 12 layanan atau 120% dari target 10 layanan.

Indikator Ketiga :

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

a. Pengertian

Adalah angka capaian pengendalian faktor risiko berdasarkan faktor risiko yang ditemukan sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di pintu masuk.

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

Adanya perubahan Renstra Kemenkes dan Hasil Revisu SAKIP Ditjen P2P, sehingga pada indikator kinerja ini terdapat perubahan metode penetapan target kinerja yang semula menggunakan angka persentase menjadi angka indeks. Berikut ini perubahan penetapan target kinerja pada indikator ini :

Perubahan Target Kinerja				
Semula			Menjadi	
Nomenklatur	Target		Nomenklatur	Target
	2020	2021		2022
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	80 %	90 %	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,80

c. Rumus / Cara Perhitungan

Indeks dihitung dari 10 parameter yakni Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam, Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 , Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (< 1), Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa < 2 , Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 , Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0, Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 , Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan, Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan, dan Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis (Bobot dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*); Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal dikurang score minimal). Sedangkan capaian indeks adalah perbandingan realisasi dan target nilai indeks yang telah ditetapkan.

Adapun data capaian 10 parameter hasil pengendalian terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang sesuai standar kekarantinaan kesehatan selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Target Pengendalian	Hasil Pengendalian	% Capaian
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	1	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	63	100
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	12	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	84	84	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	49	49	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	50	50	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	40	40	100
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	288	100
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	312	312	100
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	168	100

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator ini selanjutnya dilakukan perhitungan berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut :

Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Max	Cov Max	Score Max	Min	Score Min
2	3	4	5= 4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300	100	100	300		
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500	100	100	500		
Total				4,400			4,400		0
				1,00					

Hasil perhitungan metode USG adalah sebesar 1,00 atau 125%. Sedangkan capaian indeks adalah perbandingan realisasi dan target nilai indeks yang telah ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Nilai indeks yang dihasilkan

B = Nilai indeks yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian nilai indeks yang dihasilkan

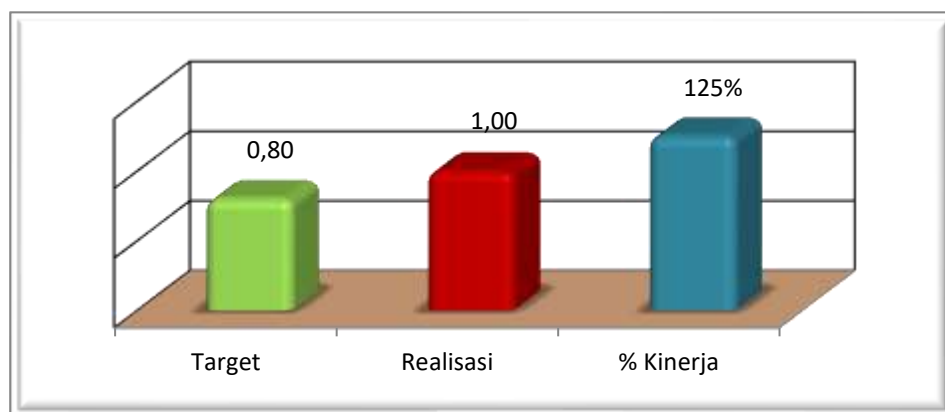
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara selama Tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1}{0.80} \times 100\% = 125\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



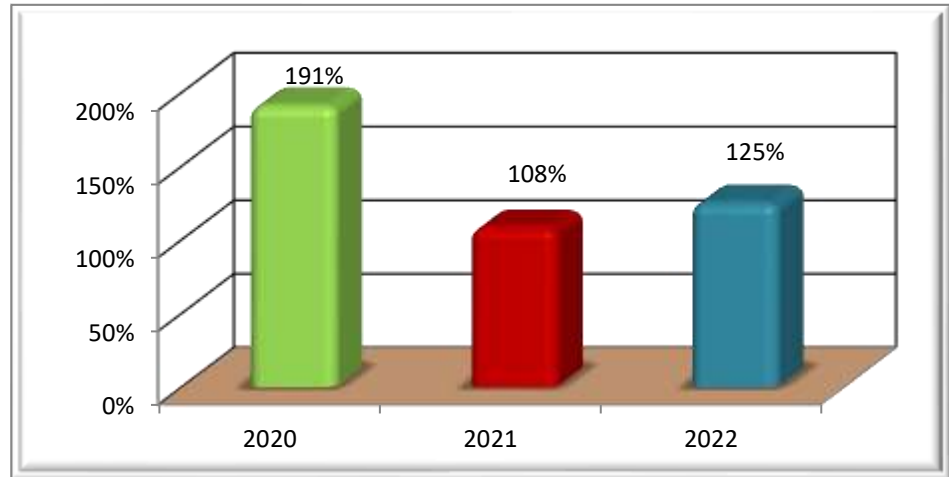
Grafik 9. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Dari grafik 9 menunjukkan bahwa capaian indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 1 atau 125 % dari target yang ditetapkan, dimana seluruh parameter telah dilakukan pengendalian faktor risiko.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara Tahun 2022 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 masih sama

dengan 2020 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya, namun terdapat perbedaan pada metode penetapan target kinerja, sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan pada capaian kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2020 – 2022 sebagai berikut :



Grafik 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 dan 2022

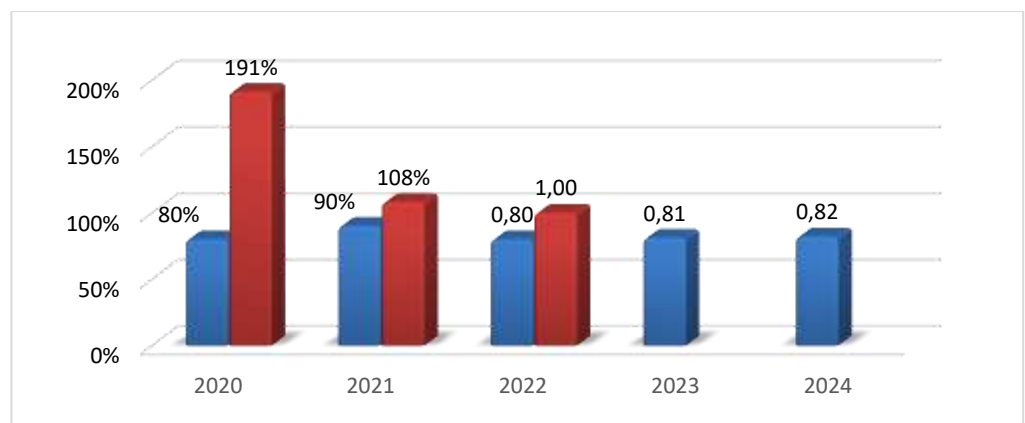
Dari grafik 10 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2022, terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya karena kondisi pandemi covid-19 Tahun 2020 terdapat realisasi yang sangat signifikan pada salah satu parameter sehingga kinerja tercapai 191%. Berbeda dengan Tahun 2021, tidak terdapat perubahan target kinerja mengingat kondisi pandemi covid-19 mulai terkendali, namun capaian kinerja dapat tercapai 108%, meskipun terjadi penurunan dari tahun 2020. Sedangkan Tahun 2022, karena adanya perbedaan metode penetapan target kinerja, sehingga mempengaruhi dalam perhitungan capaian kinerja.

Namun apabila dilihat dari data rincian hasil Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara, capaian masing-masing kegiatan selama Tahun 2020 – 2022, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan parameter dimana pada Tahun 2020 s.d 2021 memiliki 11 parameter menjadi 10 parameter pada Tahun 2022. Meskipun terdapat perbedaan parameter, tetapi sebagian besar masih relevan dengan parameter baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini data perbandingan hasil indeks pengendalian faktor risiko :

Parameter	Hasil Pengendalian		
	2020	2021	2022
Jumlah Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	26	13	1
Jumlah Bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	65	65	63
Jumlah Bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	12	12
Jumlah Bandara/pelabuhan Indeks populasi kecoa <2	0	0	84
Jumlah Bandara/pelabuhan Indeks populasi lalat <2	49	49	49
Jumlah Bandara/pelabuhan HI perimeter = 0	90	90	50
Jumlah Bandara/pelabuhan HI buffer <1	0	0	40
Jumlah Lokus TTU memenuhi syarat dengan min 3 kali pemeriksaan	252	264	288
Jumlah Lokus TPM laik hygiene dengan min 2 kali pemeriksaan	432	324	312
Jumlah Lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan min 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	164	192	168

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun ketiga dari jangka 5 Tahunan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya perubahan metode penetapan target kinerja, sehingga terdapat penurunan target dan realisasi kinerja. Namun, apabila dilihat dari capaian kinerja, indikator kinerja kegiatan ini tercapai sebesar 1 atau 125 % dari target sebesar 0.80.



Grafik 11. Perbandingan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara dengan Target RAK

Dari grafik 11 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 hingga 2022 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 dengan metode penetapan terbaru sebesar 0.82 yang telah ditetapkan

dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2022. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2022 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	93 %	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	125%

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian KKP Se-Indonesia yang memiliki wilayah pengawasan bandara dan pelabuhan, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Capaian Indikator							
	KKP Kelas II Banjarmasin		KKP Kelas II Palembang		KKP Kelas II Panjang		KKP Kelas II Samarinda	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pintu Masuk Negara	0.80	1	0.95	0.99	0.95	0.99	0.88	0.89

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 3 apabila dibandingkan dengan KKP Kelas II dengan cakupan layanan yang sama wilayah bandara dan pelabuhan tercapai lebih rendah dengan target lebih tinggi dari capaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin. Meskipun begitu, capaian kinerja masing-masing KKP dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sesuai kondisi volume kegiatan dan besarnya cakupan wilayah yang dilayani serta capaian pengendalian faktor risiko yang telah dilakukan pada setiap pintu masuk negara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan kinerja

Capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara yang tercapai 125 % mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 yang tercapai 1 hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu masuk sesuai Instruksi Dirjen P2P.
- 2) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Pes hingga wilayah kerja (Indeks Pinjal < 1)
- 3) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria hingga wilayah kerja (Indeks Anopheles < 1).
- 4) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Diare (kecoa) hingga wilayah kerja (Index populasi kecoa < 2).
- 5) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Diare (Lalat) hingga wilayah kerja (Index populasi lalat < 2).
- 6) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit DBD hingga wilayah kerja (House Index Perimeter = 0).
- 7) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit DBD hingga wilayah kerja (House Index Buffer < 1).
- 8) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan .
- 9) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah TPP Laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan .
- 10) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan bakteriologis .
- 11) Peningkatan tindakan pengendalian alat angkut dan lingkungan berupa desinfeksi berkala dalam rangka pencegahan penularan covid-19 di pintu masuk.
- 12) Penguatan kapasitas SDM dalam penanganan KKM di Pintu masuk.

- 13) Penguatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kapasitas SDM di Pintu Masuk.
- 14) Dukungan peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di pintu masuk.
- 15) Komitmen bersama para pelaksana program pada seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Tidak sinkronnya aturan pusat dan daerah dan terlalu sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan petugas dalam menerapkan peraturan.
- 2) Kesulitan koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan serta lintas sektor yang slow respon memberikan feed back
- 3) Kurangnya jumlah SDM dalam rangka pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan di pintu masuk pelabuhan dan bandara, khususnya wilker Bandara Syamsuddin Noor.

Pemecahan Masalah :

- 1) Mengaktifkan sistem komunikasi cepat untuk melakukan update informasi dan menyeragamkan pemahaman terkait peraturan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan secara berjenjang dari level petugas hingga ke pemangku kebijakan.
- 3) Melakukan koordinasi secara virtual atau komunikasi cepat dengan lintas sektor terkait.
- 4) Menambah jumlah SDM dengan perbantuan teknis lintas program dan rekrutmen tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

CKi : % Capaian Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$20,44\% = \frac{((Rp. 121,720,000 \times 125\%) - Rp. 121,055,546)}{Rp. 121,720,000} \times 100\%$$

$$101\% = 50 \% \frac{20,44\%}{20} \times 50$$

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara dapat tercapai sebesar 1 dengan capaian kinerja sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.121,055,546,- atau 99,45% dari pagu anggaran sebesar Rp. 121,720,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,44% dengan nilai efisiensi sebesar 101% untuk capaian kinerja sebesar 125 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pertimbangan sasaran yang sama dan keterbatasan tenaga pelaksana. Masa transisi pasca pandemic covid-19, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi serta peningkatan SDM bisa diikuti dan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom atau aplikasi lainnya berbasis online, meskipun pertemuan secara luring sebagian kegiatan juga dilaksanakan. Hal ini berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara melalui kegiatan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola program kegiatan. Adapun pelatihan yang telah diikuti sebanyak 17 orang tercapai melebihi target yaitu sebesar 11 orang (154,5%). Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas dalam melaksanakan pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

2. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Indikator Pertama :

Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran berdasarkan hasil perhitungan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA.

b. Definisi Operasional

Hasil capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam dokumen anggaran, dimana prosesnya melalui pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan, yang merupakan perbandingan antara capaian NKA dengan target yang ditetapkan.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan 5 parameter yaitu realisasi anggaran, capaian rincian output (CRO), konsistensi RPD, efisiensi CRO dan nilai efisiensi yang dikalikan masing-masing bobot.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA

B = Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA

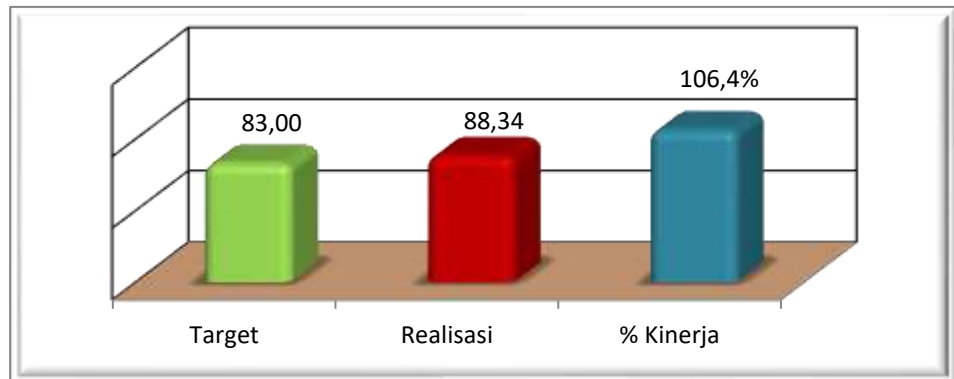
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran selama Tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{88,34}{83} \times 100\% = 106,4 \%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

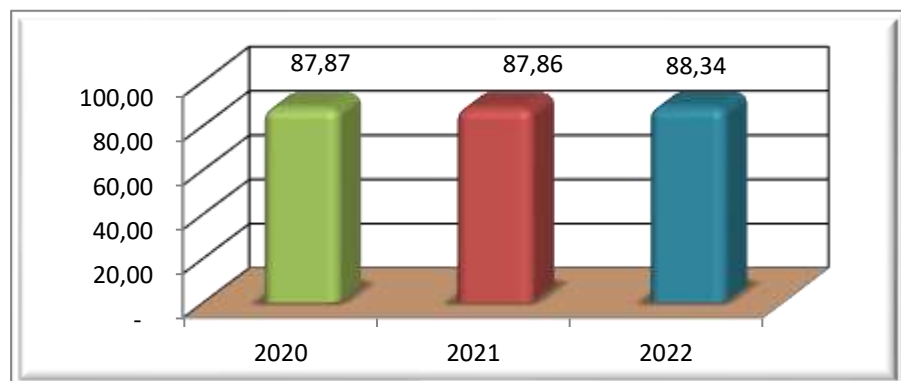


Grafik 12. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran

Dari grafik 12 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dapat tercapai > 100% yaitu sebesar 106,4 %, yang merupakan hasil perhitungan penyerapan sebesar 95,22%, konsistensi sebesar 98.3%, CRO sebesar 100%, efisiensi sebesar 4,78% dan nilai efisiensi sebesar 61.95%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 merupakan tahap ketiga pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2020 s.d 20212 masih sama atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Capaian kinerja pada Tahun 2020 s.d 2021 tercapai kurang lebih sama, sedangkan Tahun 2022 terjadi peningkatan karena adanya penurunan penyerapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 s.d 2022

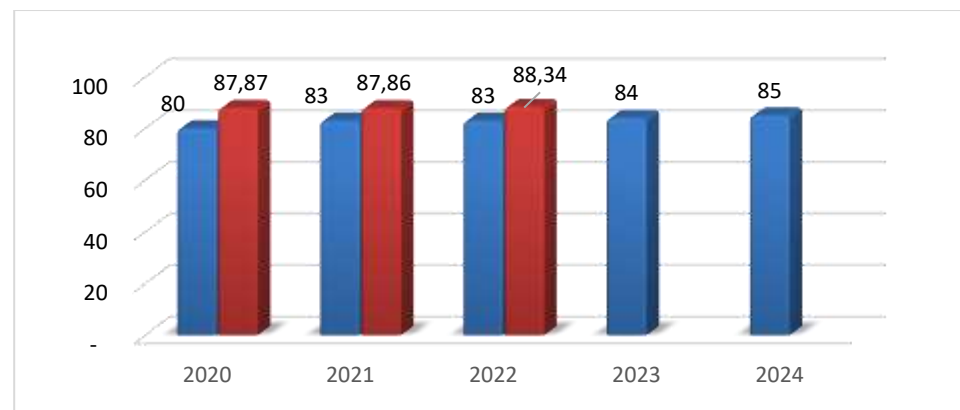
Dari grafik 13 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2022 terdapat konsistensi realisasi kinerja dengan adanya kenaikan sebesar 0.48. Untuk lebih jelasnya, rincian capaian kinerja anggaran dapat dilihat pada data berikut ini :

Parameter Penilaian	Nilai		
	2020	2021	2022
Penyerapan	96.02	97.64	95.22
Konsistensi	98.40	98.27	98.3
Capaian Output (CO) / Capaian Rincian Output (CRO)	100	100	100
Efisiensi	3.98	3.79	4.
Nilai Efisiensi	0	59.47	61.95
Nilai Kinerja Anggaran	87.87	87.86	88.34

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 s.d 2022 nilai kinerja anggaran dapat tercapai di atas target yang ditetapkan setiap tahunnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun ketiga dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 87.86 atau 106,4% dari target sebesar 83.



Grafik 14. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target RAK

Dari grafik 14 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2022 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 85 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan capaian rincian output dapat tercapai secara optimal dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola program, pengelola monev dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang terlaksana dengan baik.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2022. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2022 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	90 %	Nilai Kinerja Anggaran	106,4

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Capaian Indikator							
	KKP Kelas II Banjarmasin		KKP Kelas I Soekarno Hatta		KKP Kelas II Bandung		KKP Kelas III Palangkaraya	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran	83	88.34	85	92,37	85	87.33	79	87,26

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 4 apabila dibandingkan dengan KKP Kelas I, II dan III tercapai diatas capaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin. Hal ini dipengaruhi terkait hasil perhitungan perbandingan penyerapan anggaran, konsistensi RPD, capaian volume RO, efisiensi dan nilai efisiensi pada masing-masing satker.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian indicator kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang tercapai 106,4 % mengalami peningkatan 0,6% dibandingkan Tahun 2021 yang tercapai 105,8%, hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Penyerapan anggaran yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu karena adanya belanja pegawai yang tidak dapat direalisasikan karena adanya pegawai yang pindah kerja, meninggal dunia, cuti diluar tanggungan Negara (CTLN) dan pensiun.

- 2) Konsistensi Rencana Penarikan Dana yang tidak sesuai pada pada Bulan November dan Desember 2022.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Konsistensi pelaksanaan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA Efisiensi pada bulan berjalan belum menunjukkan efisiensi sesungguhnya, sehingga nilai kinerja anggaran pada bulan berjalan sering nilai fluktuatif.
- 2) Tidak tersedianya menu pilhan capaian nilai kinerja anggaran sesuai realisasi anggaran yang terkoneksi dengan data OM SPAN per bulan.
- 3) Capaian melebihi target dianggap sebagai data anomali.

Pemecahan Masalah :

- 1) Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Menyampaikan masukan adanya menu pilihan tambahan untuk dapat melihat rekap nilai kinerja anggaran per bulan.
- 3) Menyampaikan masukan ke Ditjen P2P terkait perubahan kriteria penilaian data anomali.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)}$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 CKi : % Capaian Keluaran i
 RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$5,68 \% = \frac{((\text{Rp. } 472,750,000 \times 106\%) - \text{Rp. } 472,665,998)}{\text{Rp. } 472.750.000} \times 100\%$$

$$64\% = 50 \% \frac{5,68\%}{20} \times 50$$

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran dapat tercapai sebesar 88,34 dengan capaian kinerja sebesar 106% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.472,665,998,- atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 472,750,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,68% dengan nilai efisiensi sebesar 64% untuk capaian kinerja sebesar 106,4%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara *virtual meeting* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Evaluasi Program

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penguatan jejaring dengan lintas program dan lintas sector serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan dan evaluasi

Program P2P melalui kegiatan antara lain : koordinasi / evaluasi pengelola program Wilayah Kerja ke Kantor Induk, Monitoring Evaluasi Pengelolaan Program ke Wilayah Kerja, mengikuti Pertemuan / Rapat koordinasi Teknis dan Evaluasi Program P2P Tingkat Pusat sebanyak 4 kegiatan.

2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersusun dokumen RKAKL Satker melalui kegiatan penyusunan e-renggar, penyusunan RKAKL, pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran serta penyusunan RAK sebanyak 2 layanan.

3) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan baik melalui aplikasi SMART DJA, Monev Bappenas, Monev E-Performance, dan kompilasi laporan dalam bentuk Laporan Tahunan, Indikator Kinerja, Laporam Kinerja dan Perjanjian Kinerja melalui kegiatan : penyusunan laporan pelaksanaan program, penyusunan laporan e-monev penganggaran, penyusunan laporan e-monev Bappenas / P 39 Tahun 2006, penyusunan laporan Tahunan satker, penyusunan laporan indikator RAK, penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja sebanyak 19 dokumen.

Indikator Kedua :**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)****a. Pengertian**

Adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

b. Definisi Operasional

Nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan nilai total dengan nilai bobot.

Adanya perubahan metode dan komponen penilaian IKPA, sehingga target yang ditetapkan mengalami perubahan yang sangat mempengaruhi hasil penilaian dan memperhatikan capaian per bulannya. Berikut ini perubahan penetapan target kinerja pada indikator ini :

Perubahan Target Kinerja								
Semula					Menjadi			
Nomeklatur			Target		Nomeklatur			Target
			2020	2021				2022
Nilai	Indikator	Kinerja	-	93	Nilai	Indikator	Kinerja	
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)					Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			90

c. Rumus / Cara Perhitungan

Penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di hitung berdasarkan perbandingan total akhir dibagi dengan nilai bobot berdasarkan hasil formulasi perhitungan 3 kriteria yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran dengan 2 parameter yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan 5 parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan 1 parameter yaitu capaian output.

Sedangkan capaian kinerja adalah perbandingan capaian nilai IKPA dengan target yang ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Capaian Nilai IKPA

B = Nilai IKPA yang ditargetkan

% C = Persentase Capaian Nilai IKPA

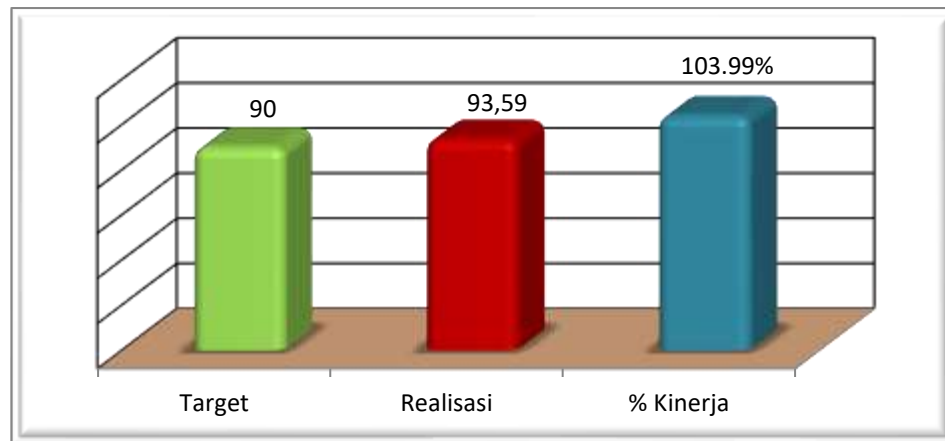
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{93,59}{90} \times 100\% = 103,99\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



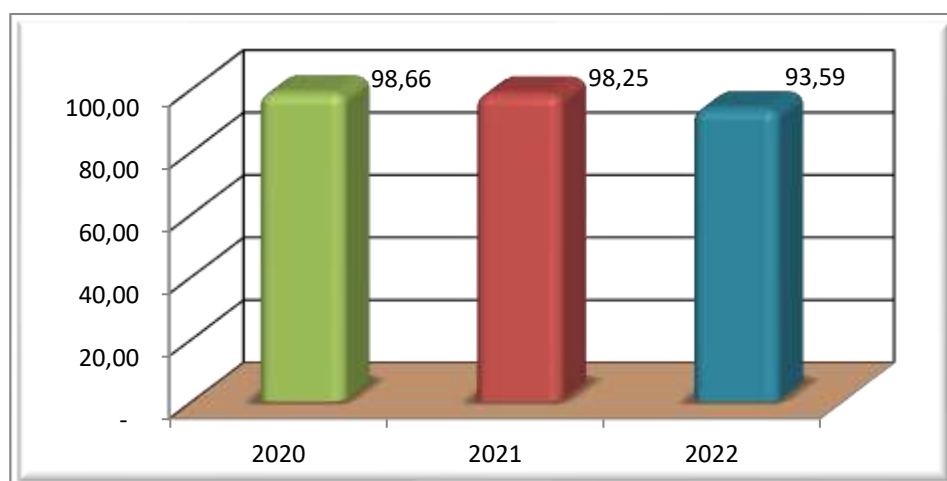
Grafik 15. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dari grafik 15 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 103,99%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada

periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan ini Tahun 2020 dengan 4 kriteria penilaian dan awalnya 11 parameter menjadi 13 parameter penilaian tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan karena adanya kebijakan relaksasi penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan hingga triwulan III dan kebijakan Ditjen P2P melakukan perubahan indikator menjadi Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan akibat pandemi covid-19. Namun hasil penilaian IKPA masih dapat terlihat pada aplikasi Monev Anggaran DJA karena pada triwulan IV telah dilakukan penilaian IKPA kembali, dimana indikator ini tercapai 98.66. Tahun 2021 indikator ini kembali ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan dengan 4 kriteria penilaian dan 13 parameter penilaian dan tercapai 98.25 dari target yang ditetapkan. Sedangkan Tahun 2022 terdapat perubahan menjadi 3 kriteria penilaian dan 8 parameter dan tercapai 93,59 dari target yang ditetapkan. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 s.d 2022

Dari grafik 16 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2022 terdapat penurunan karena adanya perbedaan kriteria penilaian dan parameter. Untuk lebih jelasnya, rincian capaian kinerja anggaran dapat dilihat pada data berikut ini :

Kriteria dan Parameter Penilaian	Nilai	
	2020	2021
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	97.67	96.56
Revisi DIPA	100	100
Deviasi Halaman III DIPA	93.02	89.68
Pagu Minus	100	100

Kriteria dan Parameter Penilaian	Nilai	
	2020	2021
Kepatuhan Terhadap Regulasi	97.22	100
Data Kontrak	100	100
Pengelolaan UP dan TUP	88.89	100
LPJ Bendahara	100	100
Dispensasi SPM	100	100
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	100	99.34
Penyerapan Anggaran	100	97.36
Penyelesaian Tagihan	100	100
Capaian Output	100	100
Retur SP2D	100	100
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	95	85
Renkas	0	0
Kesalahan SPM	95	85
Nilai IKPA	98.66	98.25

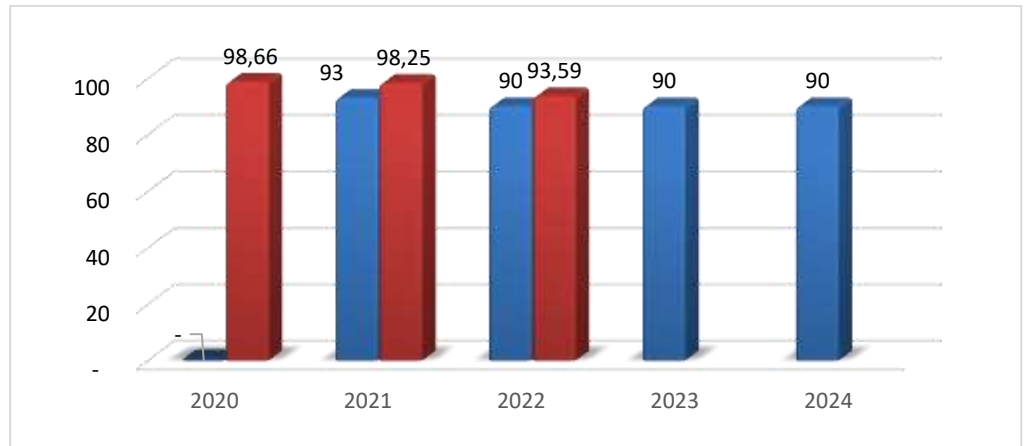
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 nilai IKPA lebih tinggi 0.41 point dibandingkan Tahun 2021. Sedangkan Tahun 2022, terdapat 3 kriteria penilaian dengan 8 parameter dapat dilihat pada data berikut ini :

No	Kriteria dan Parameter Penilaian	Nilai Akhir
		2022
A	Kualitas Perencanaan Anggaran	82,77
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	65.53
B	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.28
1	Penyerapan Anggaran	89.01
2	Belanja Kontraktual	93
3	Penyelesaian Tagihan	100
4	Pengelolaan UP dan TUP	99.37
5	Dispensasi SPM	100
C	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100
1	Capaian Output	100
	Nilai Akhir (IKPA)	93.59

Dari data tersebut di atas, tampak jelas perbedaan kriteria penilaian dan parameter Tahun 2020/2021 dan 2022. Hal ini mempengaruhi dalam penetapan target dan hasil penilaian yang diperoleh. sehingga penetapan target dan hasil yang didapat jelas

5) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun ketiga dari jangka 5 Tahunan terjadi penurunan karena adanya perubahan kriteria penilaian IKPA. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan Target RAK hingga Tahun 2024 sebagai berikut :



Grafik 17. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target RAK

Dari grafik 17 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2022, karena adanya penyesuaian target, sehingga capaian kinerja ini telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 90 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 -2024. Hal ini menunjukkan bahwa 3 kriteria penilaian dan 8 parameter dapat terpenuhi dengan baik dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola keuangan dan Tim SAI, pengelola program, dan pengelola monev meskipun kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir.

6) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2022. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2022 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	90 %	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	103,99%

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Capaian Indikator							
	KKP Kelas II Banjarmasin		KKP Kelas I Soekarno Hatta		KKP Kelas II Bandung		KKP Kelas III Palangkaraya	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	93.59	93	91,68	93	90.76	90	91

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 5 apabila dibandingkan dengan KKP Kelas I dan II tercapai dibawah capaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin dan dibawah target satker, sedangkan KKP Kelas III tercapai dibawah tetapi diatas target satker. Capaian kinerja masing-masing KKP tentunya sangat dipengaruhi hasil perhitungan kriteria dan parameter kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran pada masing masing-masing satker.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tercapai 93,59 atau 103,99% dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan
- 2) Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan
- 3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

Adanya perubahan atau metode baru dalam penilaian IKPA, mengakibatkan :

- 1) Adanya akumulasi penilaian deviasi halaman III DIPA, meskipun telah dilakukan revisi, tidak akan meningkatkan nilai parameter deviasi.
- 2) Adanya target penyerapan per periode atau triwulan, meskipun telah sesuai dengan RPD dan jadwal pelaksanaan kegiatan di satker yang tidak mungkin dilakukan percepatan.
- 3) Adanya belanja kontraktual yang dilaksanakan setelah Triwulan I, sehingga mempengaruhi nilai kontrak akselerasi.
- 4) Adanya proses GUP mendekati rentang waktu *revolving*.

Pemecahan Masalah :

- 1) Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai yang ditetapkan dan konsisten terhadap RPD yang telah disusun.
- 2) Melakukan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi target per periode.
- 3) Melakukan penyelesaian dan percepatan belanja kontraktual pada triwulan I.
- 4) Melakukan percepatan proses GUP sebelum batas waktu *revolving*.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

CK_i : % Capaian Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$9,01\% = \frac{((Rp. 18,391,038,000 \times 104\%) - Rp. 17,402,893,284)}{Rp. 18,391,038,000} \times 100\%$$

$$73\% = 50 \% \frac{9,01\%}{20} \times 50$$

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat tercapai sebesar 93,59 dengan capaian kinerja sebesar 103,99% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.17,402,893,284,- atau 94,63% dari pagu anggaran sebesar Rp.18,391,038,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,01% dengan nilai efisiensi sebesar 73% untuk capaian kinerja sebesar 103,99%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan desk atau reviu dapat dilaksanakan secara *virtual meeting* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

h. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya komitmen bersama dan sinergi dari pengelola program kegiatan dengan pengelola keuangan agar semua komponen penilaian dapat terpenuhi sesuai standar penilaian. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Layanan BMN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan BMN, penhapusan dan pemusnahan BMN, penyelesaian masalah BMN, pengelolaan hibah BMN, dan penyusunan RKBMN sebanyak 2 layanan..

2) Layanan Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan.

3) Layanan Sarana Internal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemenuhan peralatan fasilitas Perkantoran berupa pengadaan mebelair untuk pergantian fasilitas perkantoran akibat musibah banjir, pemenuhan peralatan media informasi berupa peralatan yang mendukung penyampaian informasi dan penyimpanan data secara digital, pemenuhan kendaraan bermotor berupa mobil ambulans penyakit menular sebanyak 1 unit / paket.

4) Layanan Prasarana Internal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemenuhan pengadaan lahan untuk Kantor Wilayah Kerja Batulicin seluas 1494 M2.

5) Layanan Manajemen Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester III TA. 2021, penyusunan laporan keuangan komprehensif (triwulan III TA. 2022), dan penyusunan laporan keuangan semester I TA. 2022, serta pencairan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (LS, UP dan TUP) sebanyak 2 dokumen.

Indikator Ketiga :
Kinerja implementasi WBK satker

a. Pengertian :

Adalah hasil penilaian kinerja atas implementasi WBK pada satker berdasarkan unsur penilaian manajemen perubahan, penataan tatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan dilakukan self assessment oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Nilai kinerja implementasi WBK

B = Nilai kinerja implementasi WBK yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian kinerja implementasi WBK

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

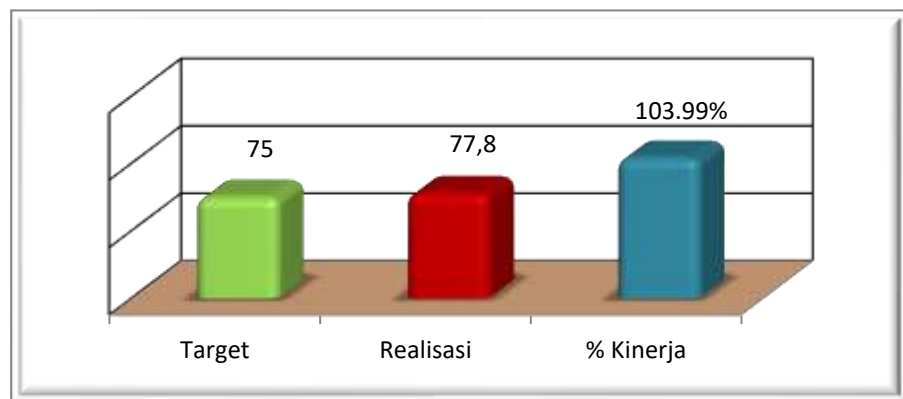
Capaian indikator kinerja kegiatan berupa kinerja implementasi WBK satker selama Tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian Tim Internal Kemenkes dapat dilihat pada data berikut ini :

Komponen Penilaian	Syarat Minimal	Hasil Penilaian
Total Nilai	75	77.80
A. Komponen Pengungkit (60%)		
1. Manajemen Perubahan	60%	95,50%
2. Penataan Tatalaksana	60%	82,14%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	60%	81,65%
4. Penguatan Akuntabilitas	60%	86,58%
5. Penguatan Pengawasan	60%	32,36%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60%	87,10%
B. Komponen Hasil (40%)		
1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel	18,25	19,28
2. Survey Pelayanan Publik yang Prima	14,00	14,75
C. Lain-Lain		
1. LHKPN	100%	100%
2. LHKASN	100%	100%
3. Presentase TLHP	100%	100%
4. Predikat SAKIP	B	B
5. Jumlah Responden	30	27

Sedangkan untuk menilai capaian kinerja sesuai hasil penilaian dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{77.80}{75} \times 100\% = 103,73 \%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



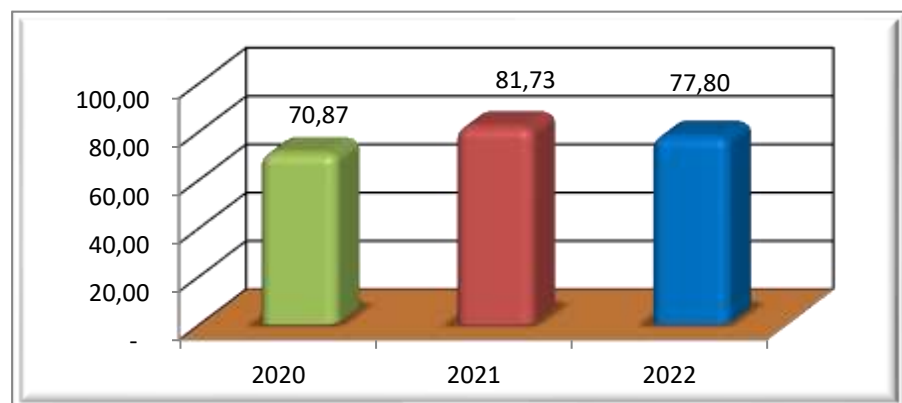
Grafik 18. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker

Dari grafik 18 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja implementasi WBK satker dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 103,99% karena adanya pendampingan dari Tim Hukormas Ditjen P2P sehingga mempengaruhi kinerja Pokja WBK dalam memenuhi persyaratan kriteria penilaian Satker WBK. Meskipun hasil penilaian di atas target, namun

penetapan Status WBK Satker Kemenkes belum memenuhi syarat minimal pada komponen pemenuhan dan reform penguatan pengawasan 32,36% dan jumlah responden survey hanya 27 orang, sehingga tidak lulus dalam tahap

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu kinerja implementasi WBK satker Tahun 2022 merupakan tahap ketiga pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2020 s.d 2021 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Capaian indikator kinerja kegiatan ini hasil *pre assessment* pada Tahun 2020 tercapai 70.87 meskipun tercapai di atas target 70 tetapi karena adanya penetapan standar minimal 75 dari Menpan RB, maka belum memenuhi syarat sebagai satker WBK, sedangkan Tahun 2021 hasil *pre assessment* Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes pada Bulan Agustus 2021 tercapai 72.38 dan masih belum memenuhi syarat, kemudian dan hasil pendampingan oleh Tim Hukormas Ditjen P2P pada bulan November 2021 memperoleh nilai 81.73. Pada Tahun 2022, hasil pendampingan Tim Hukormas Ditjen P2P pada Bulan Mei 2022 memperoleh nilai 81,44 dan telah diusulkan untuk penilaian Satker WBK di Tingkat Kemenkes yang dilakukan *Pre Assessment* pada bulan November 2022 oleh Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes dengan perolehan nilai 77.80. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

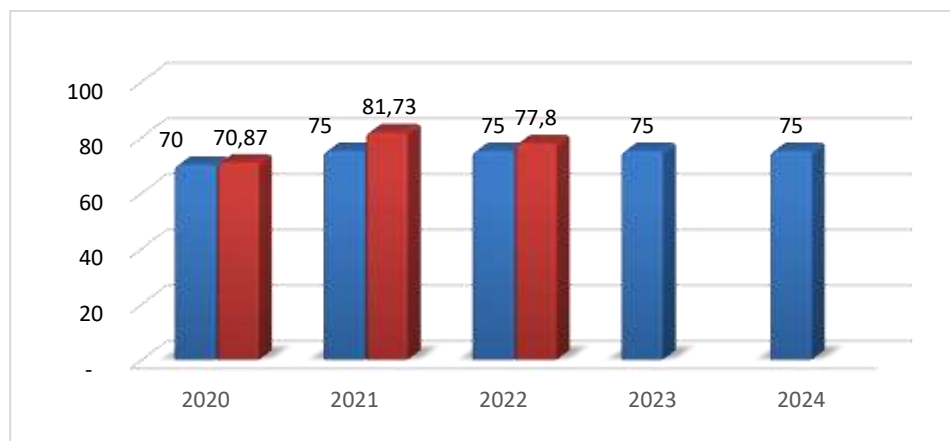


Grafik 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d 2022

Dari grafik 19 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2022 terdapat peningkatan atau perubahan manajemen menuju satker WBK, meskipun belum terpenuhinya syarat sebagai satker WBK karena terdapat 1 Pokja yang masih dibawah standar penilaian 60 dan masih memerlukan perbaikan dalam implementasi berbagai kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

7) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun ketiga dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 77.80 atau 103,73% dari target sebesar 75.



Grafik 20. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker dengan Target RAK

Dari grafik 20 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2022, berdasarkan hasil penilaian Tim Hukormas Ditjen P2P rata-rata tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 75, yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, namun apabila berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kemenkes, masih dibawah target jangka menengah. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 1 pokja yang belum memenuhi nilai standar. Meskipun begitu upaya membangun dan mengimplementasikan WBK tetap dilakukan melalui berbagai upaya perubahan dalam hal pengelolaan manajemen satker dan persepsi korupsi.

3) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra Kementerian Kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2022. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2022 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	59	Kinerja implementasi WBK satker	77.80

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Capaian Indikator							
	KKP Kelas II Banjarmasin		KKP Kelas I Soekarno Hatta		KKP Kelas II Bandung		KKP Kelas III Palangkaraya	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kinerja implementasi WBK satker	75	77.80	80	82,60	82	82	75,10	78,80

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 6 apabila dibandingkan dengan KKP Kelas I hingga KKP Kelas III capaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin masih dibawah dan belum memenuhi kriteria penilaian untuk memperoleh predikat WBK Satker Kemenkes, meskipun telah diatas standar nilai yang ditetapkan Menpan RB namun belum semua komponen penilaian terpenuhi standar minimalnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian indicator kinerja kinerja implementasi WBK satker yang tercapai 77.80 atau 103,73 % dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya perubahan sistem dan unsur penilaian WBK dan seluruh item penilaian minimal 60.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan penguatan pengawasan yang dilaksanakan internal satker.
- 3) Komitmen bersama seluruh level organisasi dari pimpinan hingga staf untuk implementasi WBK secara konsisten dan bertanggungjawab.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Belum semua difahami item atau unsur penilaian kinerja WBK dengan sistem yang baru, sehingga masih memerlukan pendampingan dari Hukormas P2P.
- 2) Penilaian WBK dilakukan secara *virtual meeting*, sehingga adaya keterbatasan dalam penjelasan dokumen yang disampaikan dan hasil penilaian.

Pemecahan Masalah :

- 1) Adanya pendampingan dan penguatan kinerja implementasi WBK dari Hukormas P2P.

- 2) Adanya waktu yang cukup memadai untuk satker memberikan penjelasan dan menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
CKi : % Capaian Keluaran i
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$5,48\% = \frac{((Rp. 197,747,000 \times 104\%) - Rp. 194,378,115)}{Rp. 197,747,000} \times 100\%$$

$$64\% = 50 \% \frac{5,48\%}{20} \times 50$$

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan kinerja implementasi WBK Satker dapat tercapai sebesar 77.80 dengan capaian kinerja sebesar 103,73% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.194,378,115,- atau 98.30% dari pagu anggaran sebesar

Rp.197,747,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,48% dengan nilai efisiensi sebesar 64% untuk capaian kinerja sebesar 103,73%. Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta reviu atau desk penilaian satker WBK dapat dilaksanakan secara *virtual meeting* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

i. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya komitmen bersama dan sinergi dari seluruh pegawai baik ASN maupun Non ASN, serta kerja sama dari semua anggota kelompok kerja dalam pelaksanaan implementasi WBK dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai indikator kinerja implementasi WBK Satker melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Layanan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan satker dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui upaya penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*, dan pengelolaan UPG, serta penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Ditjen P2P sebanyak 1 layanan.

2) Layanan Hubungan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan humas dan protokoler melalui kegiatan implementasi keterbukaan informasi publik, desiminasi / promosi informasi kegiatan melalui media cetak / bulletin SiGAR, dan implementasi budaya pelayanan prima sebanyak 1 layanan.

3) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan organisasi dan reformasi birokrasi Ditjen P2P melalui kegiatan reviu data klasifikasi UPT, penyusunan dan reviu analisis beban kerja, peta dan informasi jabatan, penyusunan / monev SOP AP UPT, serta pembangunan zona integritas menuju Satker WBK, penguatan dan pendampingan *assessment* penilaian Satker WBK/WBMM, yang hingga Tahun 2022 telah dilakukan pendampingan oleh Tim Hukormas Ditjen P2P dan *pre assessment* oleh Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes sebanyak 1 layanan.

4) Layanan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan umum dan perlengkapan berupa layanan aplikasi *meeting* berbayar, pengelolaan kantor BERHIAS, penyusunan Rencana Umum Pengadaan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 layanan.

5) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan dalam penataan persuratan dan kearsipan serta penyusutan arsip sesuai dengan dengan tata kelola arsip dan persuratan yang baik sebanyak 1 dokumen.

Indikator Keempat :**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya****a. Pengertian**

Adalah persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, pertemuan sosialisasi/seminar, *worskhop*, magang dan kegiatan peningkatan SDM lainnya dengan jumlah jam yang diikuti sebanyak 20 JPL selama 1 Tahun.

b. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) Tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

Adanya perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil revidi SAKIP Ditjen P2P Tahun 2022 agar memenuhi kriteria indikator SMART. Berikut ini perbedaan nomenklatur indikator kinerja yang dimaksud :

Semula	Target	Menjadi	Target
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL minimal sebanyak 80% jumlah ASN.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya

B = Jumlah ASN 80 % yang ditargetkan untuk ditingkatkan kompetensinya

% C = Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

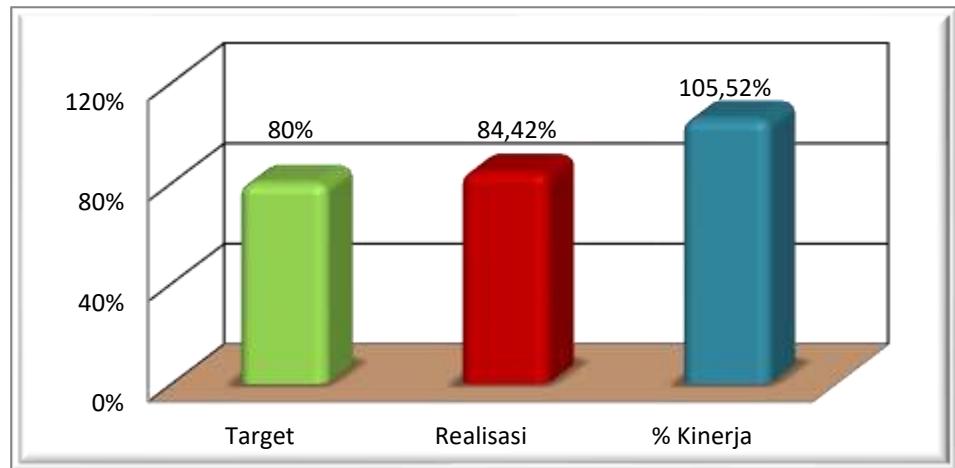
d. Capaian Indikator**1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase ASN yang ditingkatkan

kompetensinya selama Tahun 2022 sebanyak 65 orang dari jumlah pegawai 77 orang atau sebesar 84,42% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{84,42}{80} \times 100\% = 105,52\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

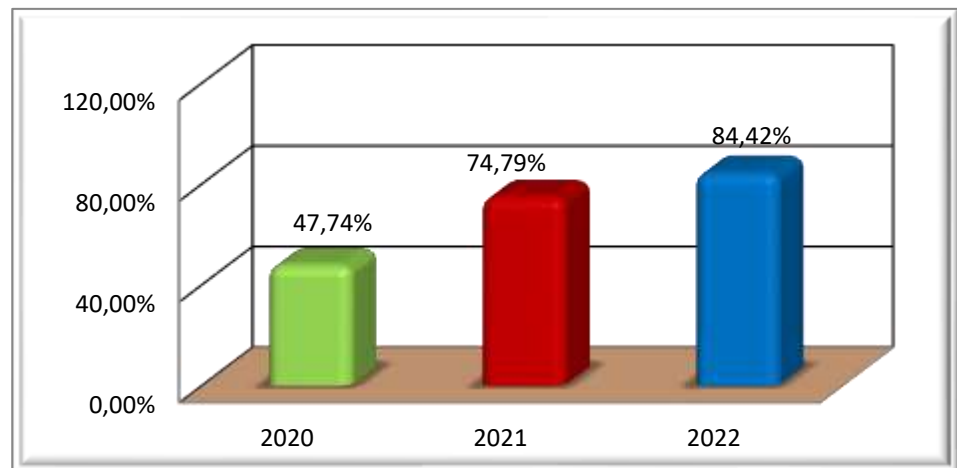


Grafik 21. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Dari grafik 21 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 105,52%. Hal ini karena peningkatan kompetensi ASN memang sangat dibutuhkan dan kegiatan dapat dipenuhi melalui *daring* dan *luring* dengan pembiayaan satker atau ditanggung dari pihak penyelenggara pelatihan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2022 merupakan tahap ketiga pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2022 terdapat perbedaan dengan Tahun 2020 s.d 2021, namun dari sisi target masih sama dengan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

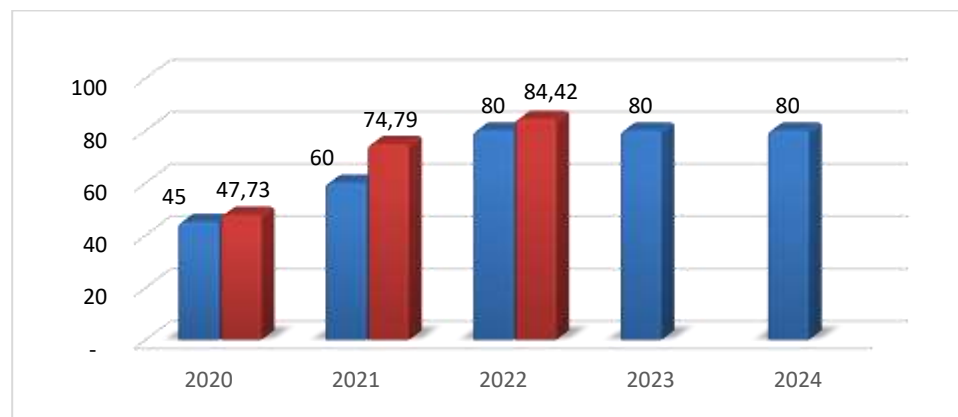


Grafik 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d 2022

Dari grafik 22 menunjukan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2022 terdapat peningkatan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena Tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan revisi target karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi dimana penyelenggaraan peningkatan SDM masih terbatas, namun setelah pandemi terkendali, terjadi peningkatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi ASN baik melalui *daring* maupun *luring* sehingga ASN memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun ketiga dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 84,42% dengan capaian kinerja 105,52 % dari target sebesar 80 %.



Grafik 23. Perbandingan Realisasi Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan Target RAK

Dari grafik 23 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2022 terjadi peningkatan capaian kinerja, meskipun masih dibawah target jangka menengah hingga 2024 sebesar 80% yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasca pandemi yang mulai pulih, semakin membuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan berbagai metode dan jumlah jam pelajaran yang lebih mudah terpenuhi sebanyak 20 JPL.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2022. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2022 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	59	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	84,42%

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Capaian Indikator							
	KKP Kelas II Banjarmasin		KKP Kelas I Soekarno Hatta		KKP Kelas II Bandung		KKP Kelas III Palangkaraya	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	80%	84,42%	72	82,52%	80	80,82%	85	97,83

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 7 apabila dibandingkan dengan KKP Kelas I dan KKP Kelas II tercapai di bawah dan KKP Kelas III tercapai di atas capaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin Meskipun begitu, capaian kinerja masing-masing KKP dapat tercapai sesuai atau melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, hal ini menunjukkan sikap proaktif dari masing-masing ASN satker untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM baik melalui *daring* ataupun *daring* sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas sesuai jabatannya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Capaian indikator kinerja persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2022 yang tercapai 105,52% dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya penyelenggaraan pelatihan secara *online* atau *daring* yang menerbitkan sertifikat.
- 2) Tersedianya kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang penyelenggaraannya dan pembiayaannya difasilitasi oleh Ditjen P2P.
- 3) Tingginya kesadaran dari para ASN untuk meningkatkan kapasitas diri untuk agar dapat bekerja lebih profesional
- 4) Tuntutan pekerjaan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Adanya perbedaan area waktu antara pihak penyelenggara dengan peserta sehingga tidak seluruhnya proses kegiatan pelatihan formal secara online dapat diikuti.
- 2) Tidak semua ASN melaporkan dan menyerahkan sertifikat hasil peningkatan kompetensi ASN yang telah diikuti

Pemecahan Masalah :

- 1) Pengaturan jadwal yang dapat disesuaikan dengan seluruh peserta pelatihan yang dilaksanakan secara online untuk seluruh area waktu.
- 2) Membuat dan menyampaikan *google sheet* kepada semua ASN untuk pendataan kegiatan peningkatan kompetensi ASN yang dilakukan *update* pengisian oleh semua ASN setiap bulannya.
- 3) Menghimbau dan menginformasikan kepada semua ASN untuk menyerahkan sertifikat atau bukti mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada kepegawaian.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 CKi : % Capaian Keluaran i
 RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$6,05\% = \frac{((Rp. 172,880,000 \times 106\%) - Rp. 172,171,606)}{Rp. 172,880,000} \times 100\%$$

$$65\% = 50 \% \frac{6,05\%}{20} \times 50$$

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan persentase asn yang ditingkatkan kompetensinya dapat tercapai sebesar 84,42% atau 108.68% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 172,171,606,- atau 99,59% dari pagu anggaran sebesar Rp. 172,880,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,05% dengan nilai efisiensi sebesar 65% untuk capaian kinerja sebesar 105,52%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan peningkatan SDM dilaksanakan secara *e-learning*, *blended learning*, dibiaya pusat, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti kegiatan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan dapat diikuti secara *virtual meeting* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

j. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi

penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai indikator kinerja persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan :

1) Layanan Manajemen SDM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan analisa kebutuhan dan perencanaan pegawai, peningkatan kompetensi pegawai untuk menduduki jabatan fungsional tertentu, layanan mutasi pegawai dan pembinaan pegawai dengan target sasaran sebanyak 70 orang.

2) Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan ini dilaksanakan bagi para calon ASN untuk keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dasar (Latsar CPNS) sebagai syarat diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebanyak 7 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator program maupun indikator kinerja kegiatan diperlukan dukungan sumber daya yang memadai yang terdiri atas Inovasi Layanan, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Adapun sumber daya yang dimiliki KKP Kelas II Banjarmasin sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Inovasi Layanan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, manajemen data, administrasi dan monitoring capaian kinerja dengan melakukan terobosan dalam pelayanan publik dan pengelolaan data, untuk meningkatkan kemudahan dalam akses pelayanan dan monitoring dan evaluasi kinerja. Adapun inovasi yang telah dilakukan antara lain :

Jenis Inovasi	Kegunaan	Link / Offline / Alat	Penanggung Jawab
Aplikasi Si Pelaut (Sistem Pengawasan Alat Angkut)	Memudahkan pencatatan status alat angkut	http://sipelaut.kantongdigital.com/	Substansi PKSE
Aplikasi "Si Bapak" (Aplikasi Barang Habis Pakai)	Memudahkan pencatatan persediaan	Offline	Subbag Adum
Locker SPM	Memudahkan dalam pengarsipan per bulan transaksi pertanggungjawaban anggaran	Peralatan	Subbag Adum
Data Kompilasi Monev Kinerja (GoogleSpreadsheet)	Memudahkan dalam monev capaian kinerja per parameter indikator kinerja	https://bit.ly/3Xfh06F https://bit.ly/3kk7q3Z	Subbag Adum
Data Kompilasi Peningkatan Kompetensi ASN (GoogleSpreadsheet)	Memudahkan dalam monev peningkatan kompetensi yang diikuti ASN	https://bit.ly/3km2xYi https://bit.ly/3iJBWUC	Subbag Adum

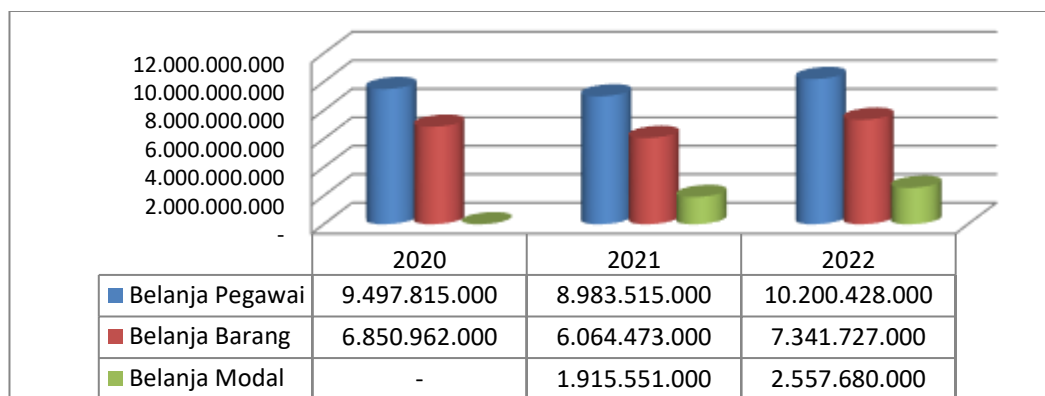
2. Sumber Daya Anggaran

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 memiliki total pagu anggaran awal sebesar Rp. 21,812,095,000,- yang telah ditetapkan pada Tanggal 17 November 2021, dimana terdapat kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2020 s.d 2021, baik bersumber RM maupun PNBP. Adapun alokasi anggaran berdasarkan sumber pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8
Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan
Tahun 2020 s.d 2022

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran TA 2020	Alokasi Anggaran TA 2021	Alokasi Anggaran TA 2022
1	Rupiah Murni (RM)	12,883,176,000	13,989,676,000	17,599,611,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3,465,570,000	2,973,863,000	4,212,484,000
	Jumlah	16,348,746,000	16,963,539,000	21,812,095,000

Selain itu, alokasi anggara berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 24. Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2022

Dari grafik 24 menunjukan bahwa terdapat peningkatan alokasi belanja Tahun 2022, dimana alokasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 113,55% dan belanja barang mengalami peningkatan sebesar 121,06%, dan belanja modal mengalami peningkatan sebesar 133,52% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan tanah Kantor Wilayah Kerja Batulicin. Dan adanya peningkatan target pendapatan PNBP yang mempengaruhi pagu penggunaan PNBP.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan Barang Milik Negara sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Barang Milik Negara yang telah diperoleh dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN yaitu; fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu informasi sesuai dengan ketentuan.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022 ini adalah per tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dengan nilai Barang Milik Negara pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 62,638,663,520,- yang mencakup seluruh transaksi Barang Milik Negara yang telah diinput dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.

Tabel 9. Laporan Posisi Barang Milik Negara
Neraca Per 31 Desember 2022

Akun Neraca	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	702,447,251
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	508,000
117131	Bahan Baku	15,770,700
131111	Tanah	44,116,090,430
132111	Peralatan dan Mesin	26,310,400,458
133111	Ge'dung dan Bangunan	13,816,380,846
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20,303,486,898)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,019,447,267)
162151	Software	141,020,000
166112	Aset Tep yang tidak digunakan dalam oprasi pemerintahan	28,647,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(28,647,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(141,020,000)
	Jumlah	62,638,663,520

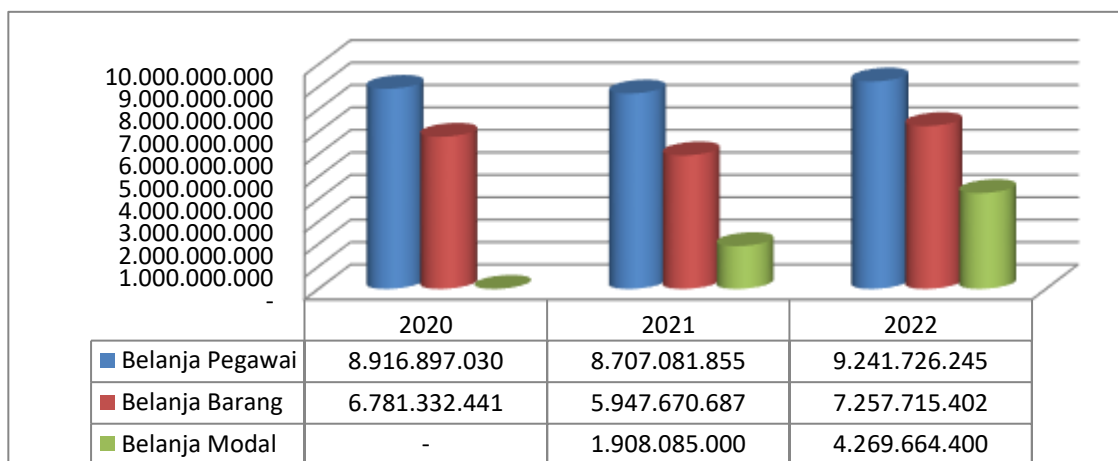
B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2022, KKP Kelas II Banjarmasin mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun alokasi dan realisasi anggaran program pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	10,200,428,000	9,241,726,245	90,60
2	Belanja Barang	7,341,727,00	7,257,715,402	98,86
3	Belanja Modal	4,269,940,000	4,269,664,400	99,99
	Jumlah	21,812,095,000	20,769,106,047	95,22

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per jenis belanja apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dari sisi persentase tetapi dari sisi realisasi meningkat sesuai alokasi anggaran. Belanja Pegawai hanya terealisasi sebesar 90,60% karena adanya penambahan pegawai CTLN dan adanya kebijakan pembayaran tunjangan kinerja 13 dan 14 hanya 50%. Untuk lebih jelas perbandingan dapat dilihat pada grafik 25 berikut ini :



Grafik 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2022

Selain itu, untuk melihat capaian kinerja dapat dilihat juga berdasarkan realisasi anggaran dan capaian output kegiatan. Untuk perbandingan realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Capaian KRO dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output Kegiatan

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	785,075,000	779,394,095	99.28	13,500	13,500	100
	011	Pelayanan Kesehatan Haji	599,096,00	597,669,924	99,76	3,500	3,500	100
	012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	185,979,000	181,724,171	97,71	10,000	10,000	100
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,100,853,000	1,073,327,217	97.50	603	603	100
	016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	175,842,00	175,069,973	99,56	2	2	100
	017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	289,650,000	289,490,830	99,95	2	2	100
	U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	120,000,000	118,500,000	98,75	200	200	100
	U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	174,000,000	156,910,000	89,87	120	120	100

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	40,318,000	40,318,000	100	38	38	100
	U08	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pes	162,099,000	162,077,464	99,99	63	63	100
	U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	9,093,000	9,090,000	99,97	21	21	100
	U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	28,800,000	28,799,950	100	90	90	100
	U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	20,076,000	18,576,000	92,53	12	12	100
	U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	8,960,000	8,960,000	100	28	28	100
	U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	15,125,000	13,925,000	92,07	5	5	100
	U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	45,550,000	45,400,000	99,67	10	10	100
	U18	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan	10,740,000	6,210,000	57,82	12	12	100
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	570,032,000	570,027,336	100	4	4	100
	001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantina Kesehatan di Pintu Masuk	570,031,000	570,027,336	100	4	4	100
4	4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	121,720,000	121.055.546	99,45	11	11	100
	001	Pelatihan Kesehatan	121,720,000	121,055,546	99,45	11	11	100
	Sub Jumlah		2,577,680,000	2,535,304,194	98,36			
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P						
1	4815.AEA	Koordinasi	320,520,000	320.519.998	100	4	4	100
	502	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Evaluasi Program	320,520,000	320.519.998	100	4	4	100
2	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14,214,617,000	13,207,677,734	93.03	18	18	100
	956	Layanan BMN	49,270,000	49,267,237	99,99	2	2	100
	957	Layanan Hukum	12,790,000	12,553,780	98,15	1	1	100
	958	Layanan Hubungan Masyarakat	72,670,000	72,655,999	99,98	1	1	100
	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10,090,000	10,089,800	100	1	1	100
	962	Layanan Umum	73,132,000	70,016,493	95,74	1	1	100
	994	Layanan Perkantoran	13,996,665,000	12,993,104,425	92,83	12	12	100
3	4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,269,940,000	4.269.664.400	99.99	2	2	100
	951	Layanan Sarana Internal	1,413,060,000	1,412,810,970	99,98	1	1	100
	971	Layanan Prasarana Internal	2,856,880,000	2,856,853,430	100	1	1	100
4	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	172,880,000	172.171.606	99.59	77	77	100
	954	Layanan Manajemen SDM	103,522,000	103,042,251	99,54	70	70	100
	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	69,358,000	69,129,355	99,67	7	7	100

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
5	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	256,458,000	255,258,327	99.53	24	24	100
	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	129,520,000	129,520,000	100	2	2	100
	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	22,710,000	22,626,000	99,63	19	19	100
	955	Layanan Manajemen Keuangan	75,163,000	74,050,284	98,52	2	2	100
	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	29,065,000	29,062,043	99,99	1	1	100
Sub Jumlah			19,234,415,000	18,233,801,853	94,80			
Total			21,812,095,000	20,769,106,047	95.22			

Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran sebesar 95,22% dan realisasi rincian output seluruhnya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya efisiensi anggaran dan optimalisasi kegiatan untuk mencapai output kegiatan secara maksimal.

Selain itu, realisasi anggaran dapat dilihat dari perbandingan dengan capaian indikator kinerja kegiatan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	0.95	0.95	100	1,925,367,000	1,916,650,675	99.55
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	100%	100.01	530,593,000	506,097,973	95.38
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0.80	1	125	121,720,000	121,055,546	99.45
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	83	88.34	106.40	472,750,000	472,665,998	99.98
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	90	93.59	103.99	18,391,038,000	17,402,893,284	94,63
		6. Kinerja implementasi WBK satker	75	77.80	103,73	197,747,000	194,378,115	98,30
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	84,42%	105,52	172,880,000	172,171,606	99,59

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tertinggi yaitu indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara sebesar 125% dengan realisasi anggaran sebesar 99,45% dan terendah pada inidikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko

penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN sebesar 100% dengan realiasi anggaran sebesar 99,55%.

Apabila dilihat dari realisasi anggaran dari 7 indikator kinerja kegiatan rata-rata lebih dari 95% dengan realisasi anggaran yang tertinggi yaitu pada indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 99.98% dengan capaian kinerja sebesar 106,40%. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,63% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 103,99%.

Hasil pencapaian ini dipengaruhi peningkatan pengawasan di pintu masuk, koordinasi dan peningkatan jejaring kerja dengan lintas sektor, sinergitas dari semua pengelola program dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih optimal. Selain itu, menunjukan bahwa kinerja dapat dilaksanakan dengan baik melebihi dari target yang ditetapkan dan dapat dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk capaian kinerja lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selama Tahun 2022.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja anggaran dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan, sehingga target kinerja kegiatan rata-rata dapat tercapai di atas 100 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,22% dari pagu anggaran sebesar Rp. 21,812,095,000,- yang meningkat sesuai alokasi anggaran, namun menurun secara capaian sebesar 2,42% dari Tahun 2021 yang sebesar 97.64% dari pagu anggaran sebesar Rp. 16,963,539,000,-, Hal ini disebabkan adanya kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pegawai dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui realokasi anggaran kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja kegiatan.

Sedangkan capaian indikator kinerja kegiatan selama Tahun 2022 berdasarkan masing-masing sasaran strategis meliputi :

1. Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN sebesar 0.95 atau 100% dari target yang ditetapkan.
 - b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai sebesar 100% atau 101,01% dari target yang ditetapkan.
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara tercapai sebesar 1 atau 124,56% dari target yang ditetapkan.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja anggaran tercapai 88.31 atau 106,40% dari target yang ditetapkan.
 - b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 93.59 atau 103,99% dari target yang ditetapkan.
 - c. Kinerja implementasi WBK satker tercapai sebesar 77.80 atau 103.73% dari target yang ditetapkan.
 - d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tercapai 84,42% atau 105,52% dari target yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja kegiatan antara lain adalah komitmen para pengelola program dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program kegiatan telah dilaksanakan hampir di semua wilayah kerja dan adanya peningkatan serta perluasan target cakupan kegiatan di wilayah kerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan optimal.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Capaian kinerja Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024, maka untuk meningkatkan capaian kinerja dan program sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P 2020 – 2024 dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penguatan manajemen organisasi internal
2. Peningkatan kompetensi seluruh ASN
3. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja
5. Perbaikan manajemen data dan informasi

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut meliputi :

1. Melakukan penguatan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin
2. Melakukan peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM terutama baik keahlian sesuai jabatan maupun dalam penguasaan teknologi dan informasi.
3. Melakukan peningkatan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan BBTCL PP Banjarbaru dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Melakukan penguatan Jejaring Kemitraan dan Koordinasi dengan instansi di wilayah pelabuhan dan bandara untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan kekarantina kesehatan.
5. Melakukan peningkatan dan penguatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala secara berjenjang di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin.
6. Melakukan penguatan dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi berbasis online, untuk mempercepat update informasi dan pengelolaan program.

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dalam mencapai target sasaran kegiatan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, namun terus berusaha meningkatkan kinerja secara internal dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, sedangkan secara eksternal dengan meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Priyanto, SKM, M.Epid.

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar **Rp. 21.812.095.000**, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, April 2022

Pihak Kedua,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,998,906
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	95%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.577.680.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	19.234.415.000
TOTAL		Rp.	21.812.095.000

Banjarmasin, April 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Priyanto, SKM, M.Epid.

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar **Rp. 21.812.095.000**, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, Juli 2022

Pihak Kedua,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	0.95
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0.80
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.577.680.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	19.234.415.000
TOTAL		Rp.	21.812.095.000

Banjarmasin, Juli 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001



ANALISA SMART



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 KKP KELAS II BANJARMASIN

ANALISA SMART INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai indeks faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN - Target dan indikator untuk menentukan status kinerja deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	- Indikator diukur berdasarkan persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar - Indikator dihitung dari perkalian bobot dan cakupan (coverage) dibagi perkalian bobot dan cakupan maksimal (<i>coverage max</i>) dikurang cakupan minimal (<i>coverage min</i>)	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan / pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar di pelabuhan / bandara / PLBDN - Capaian kinerja indikator sesuai parameter pengukuran telah dapat tercapai sebesar 100 % sesuai target yang telah ditetapkan	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan - Target dan indikator untuk menentukan faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Indikator diukur berdasarkan jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan faktor risiko terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di pintu masuk - Capaian kinerja indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan.	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan Kesehatan	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara - Target dan indikator untuk menentukan status faktor risiko di pintumasuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	- Indikator diukur berdasarkan persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%, persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal = 1, persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1), persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2, persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2, persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0, persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1, persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan, persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan, dan persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis - Indikator dihitung dari perkalian bobot dan cakupan (coverage) dibagi perkalian bobot dan cakupan maksimal (coverage max) dikurang cakupan minimal (coverage min)	- Adanya terus menerus melakukan upaya untuk melaksanakan penilaian terhadap status pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. - Capaian kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan.	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
4	Nilai Kinerja Anggaran	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja anggaran - Target dan indikator untuk menentukan besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	Indikator diukur berdasarkan Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran baik melalui penyerapan anggaran dan pemenuhan target capain output - Capaian indikator nilai kinerja anggaran telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan.	- Indikator ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per Semester selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achieveable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) - Target dan indikator untuk menentukan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada aplikasi OMSPAN	Indikator diukur berdasarkan Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	- Adanya terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan anggaran dan belanja baik kontraktual maupun non kontraktual dan UP/GUP maupun LS, pengelolaan berkas pertanggungjawaban dan capaian output. - Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan.	- Indikator ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga. - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
6	Kinerja implementasi WBK satker	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja implementasi WBK Satker - Target dan indikator untuk menentukan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (<i>self Assesment</i>) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK / WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Kemenkes	Indikator diukur berdasarkan Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja implementasi WBK Satker melalui sosialisasi implementasi ZI ke seluruh pegawai dan masyarakat yang dilayani - Capaian indikator kinerja implementasi WBK Satker telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan	- Indikator ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Perpres nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sesuai hasil penilaian selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Bound	
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya - Target dan indikator untuk menentukan jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Indikator diukur berdasarkan Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikalikan 100%.	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi melalui dukungan anggaran, fasilitas yang memadai untuk peningkatan kompetensi pegawai. - Capaian indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan	- Indikator ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART



Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001



KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

**CAPAIAN INDIKATOR
INDEKS DETEKSI FAKTOR RISIKO DI PELABUHAN/ BANDARA/PLBDN**

No	Parameter Perhitungan	Capaian								
		Juli			Agustus			September		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar	1.675.120	1.889.781	113%	1.914.423	2.190.302	114%	2.153.726	2.475.845	115%
2	Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar	46.887	58.011	124%	53.585	65.284	122%	60.283	72.281	120%
3	Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar	111	145	131%	127	171	135%	143	207	145%
4	Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar	680	676	99%	777	782	101%	874	889	102%
Total		1.722.797	1.948.613	113%	1.968.911	3.511.312	178%	2.215.025	3.511.312	159%
Nilai Indeks				0,94			0,94			0,95

No	Parameter Perhitungan	Capaian								
		Oktober			November			Desember		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar	2.393.029	2.787.762	116%	2.632.332	3.092.903	117%	2.871.635	3.416.210	119%
2	Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar	66.981	79.817	119%	73.679	87.144	118%	80.377	93.640	117%
3	Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar	158	238	150%	174	270	155%	190	297	156%
4	Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar	971	990	102%	1.068	1.091	102%	1.165	1.180	101%
Total		2.461.139	3.511.312	143%	2.707.253	3.511.312	130%	2.953.367	3.511.312	119%
Nilai Indeks				0,95			0,95			0,95



Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

CAPAIAN INDIKATOR
PERSENTASE FAKTOR RISIKO YANG DIKENDALIKAN PADA ORANG, ALAT ANGKUT, BARANG, DAN LINGKUNGAN

1. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang

No	Pemeriksaan Orang	Jumlah Faktor Risiko Ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko							Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			Rujukan	Laik Terbang	Ijin Angkut Orang Sakit	Vaksinasi Meningitis	Vaksinasi Yellow Fever	Tolak Berangkat di Bandara/ Pelabuhan	Rekomendasi Perjalanan		
1	Suhu tinggi > 37,5	2	-	1	-	-	-	1	-	2	100,00%
2	Karantina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	Covid Positif	2	1	-	-	-	-	-	1	2	100,00%
4	Sakit (non suhu)	1.540	11	1.335	154	-	-	40	-	1.540	100,00%
5	Saturasi <95	13	-	2	-	-	-	11	-	13	100,00%
6	Hamil >32 minggu	1.202	-	1.178	-	-	-	24	-	1.202	100,00%
7	Hb <8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
8	Haji : hamil <14 minggu dan > 26 minggu	1	-	1	-	-	-	-	-	1	100,00%
9	Penyakit menular yang menimbulkan wabah	8	-	-	-	-	-	8	-	8	100,00%
10	Belum vaksin meningitis	5.347	-	-	-	5.347	-	-	-	5.347	100,00%
11	Belum vaksin yellow fever	39	-	-	-	-	39	-	-	39	100,00%
12	ICV palsu/exp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
13	Positif HIV	1	1	-	-	-	-	-	-	1	100,00%
14	Positif TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
15	Positif Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
Total		8.155	13	2.517	154	5.347	39	84	1	8.155	100,00%

2. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Alat Angkut

No	Pemeriksaan Alat Angkut	Jumlah Faktor Risiko Ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko				Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi)	Tindakan Karantina	Desinseksi/ Desinfeksi pesawat	One Month Extention		
1	Ditemukan vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk alat angkut kapal	23	21	2	-	-	23	100,00%
2	Alat Angkut kapal yang penumpangnya positif	1	1	1	-	-	1	100,00%
3	Ditemukan vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk alat angkut pesawat	-	-	-	-	-	-	100,00%
4	Alat Angkut pesawat yang penumpangnya positif	-	-	-	-	-	-	100,00%
Total		24	21	3	-	-	24	100,00%

3. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Barang

No	Pemeriksaan Barang	Jumlah Faktor Risiko Ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko		Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			Tidak Berangkat/ Tunda Berangkat Sampai Dokumen Lengkap	Berangkat dengan Status Bebas Faktor Risiko		
1	Jenazah penyakit menular dan potensial wabah	1	-	1	1	100%
Total		1	-	1	1	100,00%

4. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Lingkungan

No	Pemeriksaan Lingkungan	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko						Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			Spraying	Abatisasi	Fogging	Perangkap	Rekomendasi Perbaikan Kualitas Air Bersih TMS	Rekomendasi Perbaikan Kualitas Makanan & Alat TMS		
1	TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan)	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
2	TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak)	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	16	-	-	-	-	16	-	16	100,00%
4	Vektor dilingkungan buffer dan perimeter bandara/ pelabuhan	53	9	28	7	9	-	-	53	100,00%
Total		69	9	28	7	9	16	-	53	100,00%



Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

CAPAIAN INDIKATOR
INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DI PINTU MASUK NEGARA

No	Parameter	Target 2022	Jan			Feb			Mar			Apr		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	0	0	0	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	7	7	100	11	14	133	16	21	133	21	23	110
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	0	0	0	2	0	0	3	2	67	4	2	50
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	84	7	7	100	14	14	100	21	21	100	28	28	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2	49	9	9	100	8	21	257	12	29	237	16	36	220
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	50	5	5	100	8	10	120	13	14	112	17	18	108
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1	40	4	4	100	7	8	120	10	12	120	13	16	120
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	24	24	100	48	48	100	72	72	100	96	96	100
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	312	26	26	100	52	52	100	78	78	100	104	104	100
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	9	9	100	28	18	64	42	22	52	56	25	45
Total		1067	91	91	100	179	186	104	268	272	102	356	349	98
Nilai Indeks					0,82			0,89			0,92			0,90

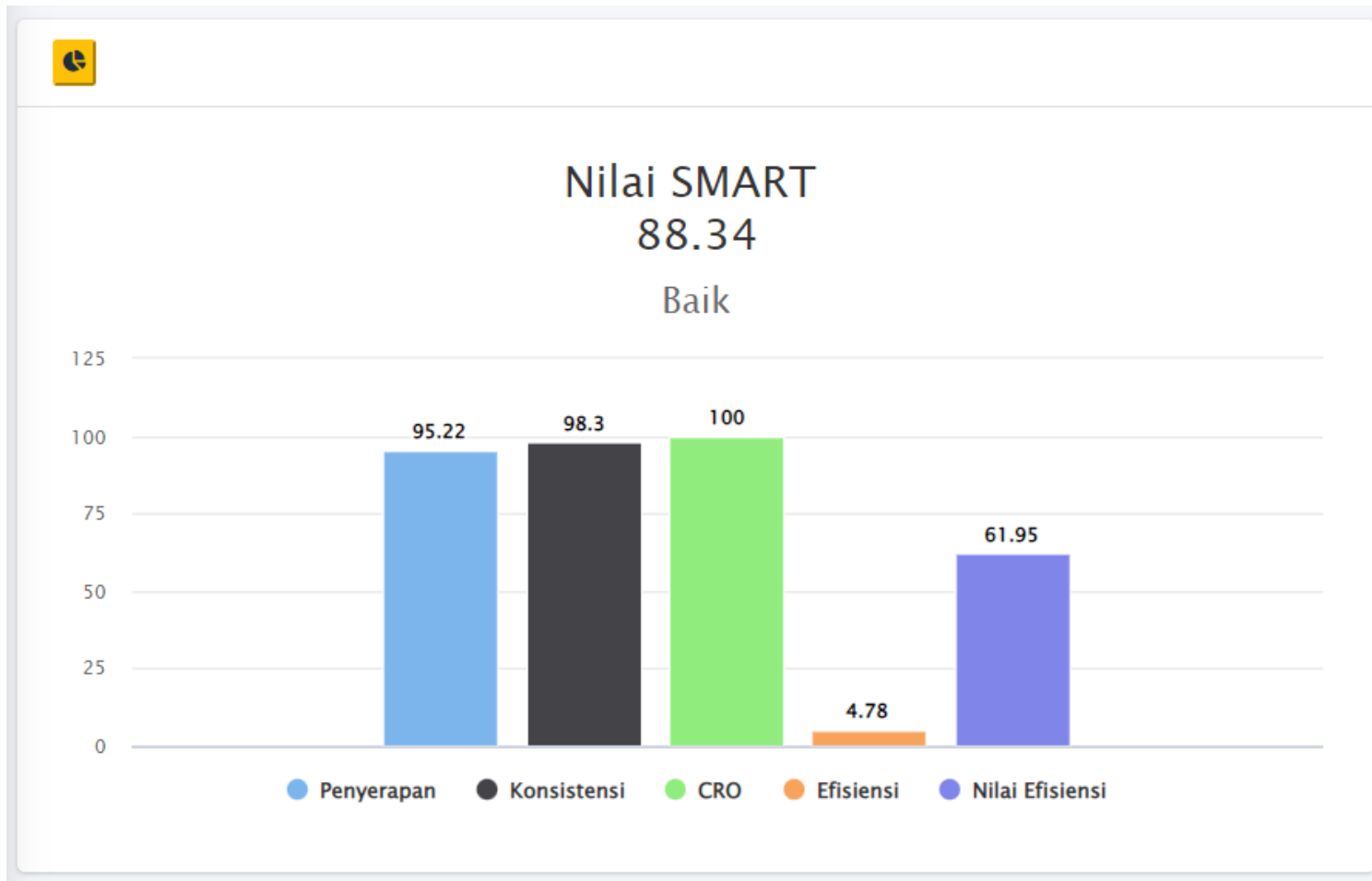
No	Parameter	Target 2022	Mei			Juni			Juli			Agustus		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	26	30	114	32	37	117	37	40	109	42	45	107
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	5	4	80	6	4	67	7	4	57	8	7	88
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	84	35	35	100	42	42	100	49	49	100	56	56	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	49	20	39	191	25	42	171	29	42	147	33	44	135
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	50	21	22	106	25	26	104	29	30	103	33	34	102
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	40	17	20	120	20	24	120	23	27	116	27	30	113
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	120	120	100	144	144	100	168	168	100	192	192	100
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	312	130	130	100	156	156	100	182	182	100	208	208	100
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	70	35	50	84	51	61	98	66	67	112	90	80
Total		1067	445	436	98	534	527	99	623	609	98	712	707	99
Nilai Indeks					0,93			0,93			0,93			0,97

No	Parameter	Target 2022	Sep			Okt			Nov			Des		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	47	52	110	53	58	110	58	63	109	63	63	100
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	9	9	100	10	12	120	11	12	109	12	12	100
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	84	63	63	100	70	70	100	77	77	100	84	84	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2	49	37	46	125	41	47	115	45	48	107	49	49	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	50	38	38	101	42	42	101	46	46	100	50	50	100
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1	40	30	33	110	33	36	108	37	38	104	40	40	100
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	216	216	100	240	240	100	264	264	100	288	288	100
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	312	234	234	100	260	260	100	286	286	100	312	312	100
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	126	114	90	140	131	94	154	153	99	168	168	100
Total		1067	801	806	101	889	897	101	978	988	101	1067	1067	100
Nilai Indeks					0,99			0,99			1,00			1,00

Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

**CAPAIAN INDIKATOR
NILAI KINERJA ANGGARAN**





Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

CAPAIAN INDIKATOR NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	045	024	415981	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN	Nilai	100.00	65.53	89.01	93.00	100.00	99.37	100.00	100.00	93.59	100%	93.59
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.55	17.80	9.30	10.00	9.94	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.77		96.28					100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022



Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

**CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA IMPLEMENTASI WBK SATKER**

Komponen Penilaian	Syarat Minimal	Hasil Penilaian
Total Nilai	75	77.80
A. Komponen Pengungkit (60%)		
1. Manajemen Perubahan	60%	95,50%
2. Penataan Tatalaksana	60%	82,14%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	60%	81,65%
4. Penguatan Akuntabilitas	60%	86,58%
5. Penguatan Pengawasan	60%	32,36%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60%	87,10%
B. Komponen Hasil (40%)		
1. Biroraksi Bersih dan Akuntabel	18,25	19,28
2. Survey Pelayanan Publik yang Prima	14,00	14,75
C. Lain-Lain		
1. LHKPN	100%	100%
2. LHKASN	100%	100%
3. Presentase TLHP	100%	100%
4. Predikat SAKIP	B	B
5. Jumlah Responden	30	27



Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

**CAPAIAN INDIKATOR
PERSENTASE ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA**

**DAFTAR INVENTARISASI SATUAN KERJA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN SEBANYAK 20
JPL (MINIMAL 80% ASN) TAHUN 2022**

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun			
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja	magang / praktik kerja
1	BAMBANG PRIYANTO, S.KM, M.EPID.				16				10	6			4	24													60	Terpenuhi
2	BASUKI RAHMAT, SKM, MM								8	4			4	8													24	Terpenuhi
3	R. DJAROT DARSONO WAHYU HARTANTO, S.KM., M.EPID.								10	6			4	20	47												87	Terpenuhi
4	BAJU NOOR INDRIANTO, SKM, M.S					47			18	2																	67	Terpenuhi
5	dr. MUHAMMAD KHAIDIR								36	4				4													44	Terpenuhi
6	MUHAMMAD ALMAWARDI, SKM								4	6				4													14	Tidak Terpenuhi
7	AKHMAD YANIE, SKM								8	4			4	8			33										57	Terpenuhi
8	MURIYATI								6	4			4														14	Tidak Terpenuhi
9	RETNALISA								4	4				4													12	Tidak Terpenuhi
10	RR. RIDHA KIRANA SULISTYA NINGTYAS, SKM								24	16			16	4	47												107	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun			
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja	magang / praktik kerja
11	KHANSA RAF RAF, SKM				39	136			134	32			4	4			33										382	Terpenuhi
12	SYAIPUL RAHMAN, SKM								18					4													22	Terpenuhi
13	FATHIAH HERAWATI, SKM								36	16				16	47												115	Terpenuhi
14	NORJANAH, SKM								4	8			10	4													26	Terpenuhi
15	YENI SUSANTI MASSANG, SKM								32	4				4													40	Terpenuhi
16	SAFRUDIN								4	4				4													12	Tidak Terpenuhi
17	HASANUDDIN								6	2				4													12	Tidak Terpenuhi
18	ANDI SYARIF, SKM					4			18	6				6													34	Terpenuhi
19	ZULFAIZAH, SKM., ME.								6	6			4	24			36										76	Terpenuhi
20	INDAH INDRIAWATI, SH., MH.								8	6				32													46	Terpenuhi
21	AFIAT NAFARIN, SKM								16	4				4													24	Terpenuhi
22	EKA NYUNITA SARI, SKM								4	24			4	4													36	Terpenuhi
23	NOR ISNANIAH, AMK					22			27	4																	53	Terpenuhi
24	NURUL HUDA LISNA								4	4				4													12	Tidak Terpenuhi
25	MUHAMMAD IHSAN								8	2																	10	Tidak Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal												JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun	
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri	komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja			magang / praktik kerja
26	dr. SHINTA KUMALA AYU								19	4			4														27	Terpenuhi
27	dr. EFNOVA BERTIANI								41	4																	45	Terpenuhi
28	dr. SANDRA REINNY PARENGKUAN								13	9																	22	Terpenuhi
29	YULKHAIDIR, S.AP								4	6			4														14	Tidak Terpenuhi
30	ARY ARYATI								24	4			12														40	Terpenuhi
31	ACEP YUWIASNA, S.KM.								23	6			24														53	Terpenuhi
32	MUHAMMAD RAVI ABDULLAH, SKM								8	2			10														20	Terpenuhi
33	DEDDY SORANTO								8	8			4														20	Terpenuhi
34	RIZAIN SYAMSU								6	4																	10	Tidak Terpenuhi
35	CHAIRIYANTI, SKM								4	4			12			33											53	Terpenuhi
36	RAHADIYAN NOOR					52			4	4			4														64	Terpenuhi
37	ISWATIN								4																		4	Tidak Terpenuhi
38	ANITA FAIRIDAH, SKM								64	26																	90	Terpenuhi
39	ISRANUDIN, SKM								24																		24	Terpenuhi
40	PRAYITNO					47			8				4	24													83	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun		
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja
41	MUHAMMAD IHRAMSYAH NUR, SKM					87		4	4				8													103	Terpenuhi
42	FATIMAH, SE							24	4							115										143	Terpenuhi
43	ERMA YUNIAR							14	4			4	12													34	Terpenuhi
44	ELFIA NAJMI NORMAYANTI, SKM							20	4			12	4													40	Terpenuhi
45	SANDRA VERAWATI, Amd.KL							24	16			10														50	Terpenuhi
46	EKA HERMALIYANIE, SKM							30	22																	52	Terpenuhi
47	BAHRIANSYAH							10	2																	12	Tidak Terpenuhi
48	RUSLINA							4	6				12													22	Terpenuhi
49	FAUZI RAHMAN PASA							16	4																	20	Terpenuhi
50	AGUS SYAIFUDINNOR					8		28					12													48	Terpenuhi
51	ERWAN TAUFIK IKHTIAR	40																								40	Terpenuhi
52	RIZAL ARIYADI, A.Md					47		20	4			12	4													87	Terpenuhi
53	AMELIA YUNI LESTARI, Amd							16	4				4													24	Terpenuhi
54	MUHAMMAD AL HUSARI							12	4				8													24	Terpenuhi
55	KHAIRUL IKHWAN							6	4			20	4			39										73	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal												JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun	
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri	komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja			magang / praktik kerja
56	AQSO AMPRI HARAHAH, SKM								52	8			4														64	Terpenuhi
57	ERIS TAJUDINNOOR, AMKL								16					4													20	Terpenuhi
58	LAILY ARYANI	40																									40	Terpenuhi
59	RAHMI MADINA								44	18			3	2													67	Terpenuhi
60	MAHYUNI								14	2				4													20	Terpenuhi
61	FAHRIZAL FERMANA FUTERA					360			34																		394	Terpenuhi
62	CHAIRUNNISA PERMATA SARI, A.Md.Kep					50			14	4																	68	Terpenuhi
63	FATIMAH		20			12			8	6																	46	Terpenuhi
64	ADI DARMAWAN					48			4	4			4	4													60	Terpenuhi
65	AHMAD FAISAL								4	8			14														26	Terpenuhi
66	DR. LAELY KODRYATI					56			4	4			4	4													72	Terpenuhi
67	NUR RAHMAWATI							40	4	4			4	24													76	Terpenuhi
68	ISMAIL SALEH								24	4																	28	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun		
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja
69	MAKMUN																									0	Tidak Terpenuhi
70	dr. M.AZIZUR RAHIM								12	4		647		4												667	Terpenuhi
71	dr. HENDY NUGRAHA					24			16	4		647		4												695	Terpenuhi
72	REDY CAHYA NUGRAHA, S.KOM							40		4		647		4	47											742	Terpenuhi
73	NOFALIA KHOLIFATUL ANGGRAENI, S.KM.								4	8		647														659	Terpenuhi
74	NOVYANI AD'HARI								4	8		647														659	Terpenuhi
75	WILLY PRASETYO AGUNG WICAKSONO								20	4		647		4												675	Terpenuhi
76	KHAIRINA NUR NAJMI								4	6		647		4												661	Terpenuhi
77	SANDY KURNIAWAN, S.KM.								19	4				4												27	Terpenuhi

Banjarmasin, Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118A Banjarmasin Kalimantan Selatan - 70116

Telepon/Faximile: (0511) 3363948

Email: kkp.banjarmasinnew@yahoo.com / kkp.banjarmasin@yahoo.co.id

Website: www.kkpbanjarmasin.or.id



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

NOMOR : HK.02.03/1/3057/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN (LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN KINERJA DAN PROFIL KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN TAHUN 2022

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan salah satunya melalui penyusunan laporan kegiatan baik Laporan Tahunan, Laporan Kinerja maupun Profil sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan unit kerja atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kegiatan (Laporan Tahunan, Laporan Kinerja dan Profil) KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2022;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan Kepala KKP Kelas II Banjarmasin.
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Noomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 71/PMK.02/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.02/2020 yang mengatur tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
9. Surat Pengesahan DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-024.05.2.415981/2022 tanggal 17 November 2021;
- Mengingat : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/IV/4328/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan.Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN (LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN KINERJA DAN PROFIL) TAHUN 2022 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN;

- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kegiatan (Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Dan Profil) Tahun 2022 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin;
- Kedua : Melaporkan hasil penyusunan laporan kegiatan dimaksud kepada Kepala Kantor sesuai batas waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 07 November 2022



Bambang Priyanto, SKM., M.Epid

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN (LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN KINERJA DAN PROFIL
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN
TAHUN 2022**

A. Laporan Tahunan Wilayah Kerja

Koordinator : Semua Kepala Wilayah Kerja
Anggota : Semua ASN di Wilayah Kerja
Batas Waktu Penyelesaian : **05 Januari 2023**

B. Laporan Tahunan Substansi PKSE

Koordinator : Khansa Raf Raf, S.KM.
Anggota : Semua ASN di Subtansi PKSE
Batas Waktu Penyelesaian : **10 Januari 2023**

C. Laporan Tahunan Substansi PRL

Koordinator : Akhmad Yanie, S.KM.
Anggota : Semua ASN di Subtansi PRL
Batas Waktu Penyelesaian : **10 Januari 2023**

D. Laporan Tahunan Substansi UKLW

Koordinator : Basuki Rahmat, S.KM., MM.
Anggota : Semua ASN di Subtansi UKLW
Batas Waktu Penyelesaian : **10 Januari 2023**

E. Laporan BMN

Koordinator : Yulkahidir, SAP.
Anggota : 1. Redy Cahya Nugraha, S.Kom.
2. Chairiyanti, S.KM.
Batas Waktu Penyelesaian : **10 Januari 2023**

F. Laporan Keuangan

Koordinator : Aqso Ampri Harahap, S.KM.
Anggota : 1. Khairina Nur Najmi, A.Md.
2. Redy Cahya Nugraha, S.Kom.
Batas Waktu Penyelesaian : **10 Januari 2023**

G. Laporan PNBP

Koordinator : Khansa Raf Raf, S.KM.
Anggota : 1. Fatimah, S.Ak.
2. Fahrizal Fermana Futra, AMK.
Batas Waktu Penyelesaian : **10 Januari 2023**

H. Laporan Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin

Koordinator : R. Djarot Darsono Wahyu Hartanto, S.Pd, M.Epid.
Anggota : Chairiyanti, S.KM.
Batas Waktu Penyelesaian : **15 Januari 2023**

I. Laporan Kinerja KKP Kelas II Banjarmasin

Koordinator : Zulfaizah, S.KM., M.E.
Anggota : 1. Rr. Ridha Kirana S, S.KM.
2. Aqso Ampri Harahap, S.KM.
3. Erma Yuniar, AMK.
4. Khairul Ikhwan, S.KM.
5. Nur Rahmawati, SE.
Batas Waktu Penyelesaian : **20 Januari 2023**

J. Profil KKP Kelas II Banjarmasin

Koordinator : Eka Nyunita Sari, S.KM.
Anggota : 1. Indah Indriawati, SH., MH.
2. Sandra Verawati, S.KM.
3. Dr. Hendy Nugraha
Batas Waktu Penyelesaian : **20 Januari 2023**

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 07 November 2022



Bambang Priyanto, SKM., M.Epid

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN
TIM SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)**

**CATATAN HASIL EVALUASI (CHE)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Tahun 2022 Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai berikut:

Uraian Catatan Hasil

Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Nomor HK.02.03/1/250/2022 Tentang Tim Satuan Kepatuhan Intern di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dan Surat Sesditjen No. PR.05.04/C.I/271/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Permintaan Laporan Kinerja Satker Ditjen P2P Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja sebagai berikut:

A. Format Laporan Kinerja

- Kerangka penulisan telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan telah memuat analisis capaian kinerja pada setiap indikator kinerja kegiatan.
- Laporan memuat analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya pada setiap indikator kinerja kegiatan.
- Laporan kinerja telah memuat inovasi.
- Laporan telah memuat Tindak Lanjut yang akan dilakukan

B. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

- Laporan disusun sesuai dengan Tupoksi organisasi.
- Setiap sasaran telah didukung dengan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan Eselon I.
- Penetapan target kinerja sesuai dengan metode perhitungan yang telah ditetapkan dan mengacu pada *baseline* capaian kinerja tahun sebelumnya.
- Capaian kinerja disusun sesuai dengan kertas kerja dan metode perhitungan yang telah ditetapkan.

C. Substansi Laporan Kinerja

- Analisis laporan kinerja per masing-masing indikator telah dilengkapi.
- Telah membandingkan kesesuaian tujuan/sasaran dalam LAKIP dengan Perjanjian Kinerja.
- Cara penetapan target dan perhitungan capaian pada indikator Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan indikator Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara telah menggunakan metode USG.
- Perhitungan capaian pada indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang alat angkut barang dan lingkungan berdasarkan pada hasil temuan dibagi dengan hasil yang dikendalikan dikali 100%.
- Nilai capaian pada indikator nilai kinerja anggaran telah sesuai dengan hasil NKA pada aplikasi SMART Kemenkeu.
- Nilai capaian pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan hasil penilaian IKPA pada aplikasi Monev PA OM SPAN.

- Perolehan nilai pada indikator implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah sesuai dengan Lembar Kertas Evaluasi (LKE) Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes.
- Penetapan target dan perhitungan indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya berdasarkan pada hasil rekapitulasi pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 JPL.

D. Catatan Permasalahan Lainnya

- Rekomendasi LKE tahun 2021 terkait perubahan indikator mengikuti kebijakan perubahan Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P.
- Perbaikan dan inovasi terkait manajemen data baik di Substansi maupun di Sub Bagian Administrasi Umum.
- Peningkatan layanan dan inovasi dalam pelayanan publik.

Koreksi/Perbaikan

- A. Koreksi/Perbaikan yang telah dilakukan
-
- B. Koreksi/Perbaikan yang belum dilakukan
-

Rekomendasi

Berdasarkan catatan hasil evaluasi, maka disampaikan catatan perbaikan sebagai berikut:

- Memberikan justifikasi / penjelasan terkait perubahan indikator yang bukan dilakukan atas kebijakan satker.
- Melakukan upaya perbaikan mekanisme pengelolaan data baik level Substansi dan Sub Bagian Administrasi Umum
- Adanya upaya melalui inovasi atau terobosan baru untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dan tata kelola administrasi

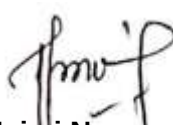
Tim Satuan Kepatuhan Intern,

Anggota



Eka Nyunita Sari, SKM
NIP. 198510302008122001

Anggota



Elfia Najmi Normayanti, SKM
NIP. 198612302008012004

Anggota



dr. Hendy Nugraha
NIP. 199511242022031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Banjarmasin,



Bambang Priyanto, SKM, M.Epid
NIP. 196709171990031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118A Banjarmasin Kalimantan Selatan - 70116

Telepon/Faximile: (0511) 3363948

Email: kkp.banjarmasinnew@yahoo.com / kkp.banjarmasin@yahoo.co.id

Website: www.kkpbanjarmasin.or.id



LEMBAR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Tahun 2022 berdasarkan hasil Catatan Hasil Evaluasi Tim Satuan Kepatuhan Intern Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai berikut:

Uraian Hasil Reviu

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2022 berdasarkan pada Surat Sesditjen No. PR.05.04/C.I/271/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Permintaan Laporan Kinerja Satker Ditjen P2P Tahun 2022.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Satuan Kepatuhan Intern Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin terhadap Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Format Laporan Kinerja

- Kerangka penulisan telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan telah memuat analisis capaian kinerja pada setiap indikator kinerja kegiatan.
- Laporan memuat analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya pada setiap indikator kinerja kegiatan.
- Laporan kinerja telah memuat inovasi.
- Laporan telah memuat Tindak Lanjut yang akan dilakukan

B. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

- Laporan disusun sesuai dengan Tupoksi organisasi.
- Setiap sasaran telah didukung dengan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan Eselon I.
- Penetapan target kinerja sesuai dengan metode perhitungan yang telah ditetapkan dan mengacu pada *baseline* capaian kinerja tahun sebelumnya.
- Capaian kinerja disusun sesuai dengan kertas kerja dan metode perhitungan yang telah ditetapkan.

C. Substansi Laporan Kinerja

- Analisis laporan kinerja per masing-masing indikator telah dilengkapi.
- Telah membandingkan kesesuaian tujuan/sasaran dalam LAKIP dengan Perjanjian Kinerja.
- Cara penetapan target dan perhitungan capaian pada indikator Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan indikator Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara telah menggunakan metode USG.

- Perhitungan capaian pada indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang alat angkut barang dan lingkungan berdasarkan pada hasil temuan dibagi dengan hasil yang dikendalikan dikali 100%.
- Nilai capaian pada indikator nilai kinerja anggaran telah sesuai dengan hasil NKA pada aplikasi SMART Kemenkeu.
- Nilai capaian pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan hasil penilaian IKPA pada aplikasi Monev PA OM SPAN.
- Perolehan nilai pada indikator implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah sesuai dengan Lembar Kertas Evaluasi (LKE) Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes.
- Penetapan target dan perhitungan indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya berdasarkan pada hasil rekapitulasi pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 JPL.

D. Hal Yang Harus Diperhatikan

- Rekomendasi LKE SAKIP Tahun 2021 terkait perubahan indikator mengikuti kebijakan yang bersifat *given* dari Eselon I.
- Perbaikan dan inovasi terkait manajemen data baik di Substansi maupun di Sub Bagian Administrasi Umum.
- Peningkatan layanan dan inovasi dalam pelayanan publik.

Rekomendasi

Berdasarkan catatan hasil evaluasi, maka disampaikan catatan perbaikan sebagai berikut:

- Menindaklanjuti segera hasil LKE SAKIP Tahun 2021.
- Mempersiapkan dokumen kelengkapan Evaluasi SAKIP Tahun 2022



Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Banjarmasin

Bambang Priyanto, SKM, M.Epid
NIP. 196709171990031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118A Banjarmasin Kalimantan Selatan - 70116

Telepon/Faximile: (0511) 3363948

Email: kkp.banjarmasinnew@yahoo.com / kkp.banjarmasin@yahoo.co.id

Website: www.kkpbanjarmasin.or.id



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.

NIP : 196709171990031001

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I - IV/b

Jabatan : Kepala Kantor Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2022 telah melalui mekanisme review dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Tim Penyusun yang akan mengumpulkan data, melakukan kompilasi dan Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022.
2. Telah disusun sesuai dengan format Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala setiap bulan dan triwulan selama Tahun 2022 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan RAK Periode 2020-2024.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dengan melakukan koreksi/ telaah/ revisi atas hasil penyusunan Laporan Kinerja.
5. Telah dilakukan evaluasi oleh Tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dengan terbitnya Catatan Hasil Evaluasi (CHE).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, Januari 2023

Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001